

**DASAR FILOSOFIS DAN KONTEKS HISTORIS
WAWASAN KEBANGSAAN
DALAM KURIKULUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam
Pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya**



**Oleh
Anita Puji Astutik
NIM. F53417023**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anita Puji Astutik
NIM : F53417023
Program : Doktor (S-3)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2020

Saya yang menyatakan,

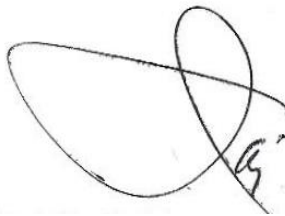


Anita Puji Astutik

PERSETUJUAN

Disertasi Anita Puji Astutik ini telah disetujui
Pada tanggal 31 Mei 2020

Oleh
Promotor,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a short vertical stroke.

Prof. H. Achmad Jainuri, M.A., Ph.D.

Promotor,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul

"DASAR FILOSOFIS DAN KONTEKS HISTORIS WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KURIKULUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO"

yang ditulis oleh Anita Puji Astutik ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka
pada tanggal 11 Agustus 2020

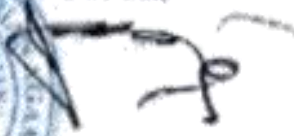
Tim Penguji:

- | | | |
|--|-----------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. | (Ketua/ Penguji) |  |
| 2. Dr. H. Hamnis Syafaq, M.Fil.I | (Sekretaris/ Penguji) |  |
| 3. Prof. H. Achmad Jaimuri, M.A. Ph.D. | (Promotor/ Penguji) |  |
| 4. Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A. | (Promotor/ Penguji) |  |
| 5. Prof. Dr. ILAhmad Parloni, M.Ag. | (Penguji) |  |
| 6. Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag. | (Penguji) |  |
| 7. Mokhammad Saifuddin, M.Ed., Ph.D. | (Penguji) |  |

Surabaya, 11 Agustus 2020



Direktur,


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANITA PUJI ASTUTIK
NIM : F53417023
Fakultas/Jurusan : STUDI ISLAM
E-mail address : bundafahraza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☒ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Dasar Filosofis Dan Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Kurikulum

Al Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2020

Penulis

(Anita Puji Astutik)

ABSTRAK

Judul : Dasar Filosofis Dan Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Kurikulum Al Islam Dan Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Peneliti : Anita Puji Astutik

Promotor : Prof. H. Achmad Jainuri, M.A. Ph.D.
Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

Kata Kunci : Wawasan Kebangsaan, Internalisasi, Kurikulum, Al Islam dan Kemuhammadiyah

Di zaman keterbukaan informasi ini negara kita dihadapkan dengan berbagai macam ideologi ekstrem. Fenomena maraknya isu gerakan anti nasionalisme di beberapa Perguruan Tinggi menggugah pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melakukan tindakan preventif dengan sasaran mahasiswa yang mengalami perubahan identik dengan ciri-ciri kelompok gerakan Islam radikal. Tindakan preventif lainnya adalah dengan mengoptimalkan internalisasi nilai kebangsaan dalam materi wawasan kebangsaan pada matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah III.

Penelitian ini menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah? (2) Bagaimanakah proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan? (3) Bagaimanakah internalisasi nilai kebangsaan Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan materi wawasan kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo?

Penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan *multidisciplinary approach*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis datanya adalah proses reduksi, penyajian dan verifikasi data dengan mengecek sebuah kualitas data menggunakan teknik *presistent observation* dan *trianqulasi*.

Hasil penelitian ini, pertama, dasar filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah merujuk pada 7 falsafah ajaran Muhammadiyah. Konteks historisnya terlihat pada konsistensi Muhammadiyah dalam memajukan bangsa. Kedua, proses perumusan materi wawasan kebangsaan diawali dengan rekonstruksi materi Al Islam dan Kemuhammadiyah III dengan PKn melalui pendekatan civic education. Peninjauan kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah III perlu dilakukan lagi sesuai dengan rumusan Muhammadiyah *Da>rul 'Ahdi Wa Shaha>dah*. Ketiga, aktualisasi materi wawasan kebangsaannya melalui program amal usaha Muhammadiyah yang meliputi MDMC dan LAZIZMU serta kegiatan internal melalui UKM Hizbul Wathan, KKN Muhammadiyah Untuk Negeri, dan PKM.

ABSTRACT

Title : Philosophical Basis and Historical Context of Nationalistic Insights
In the curriculum of Al Islam and Kemuhammadiyah at
Muhammadiyah University, Sidoarjo

Researcher : Anita Puji Astutik

Promoter : Prof. H. Achmad Jainuri, M.A. Ph.D.
Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

Keywords : Nationality Insight, Internalization, Curriculum, Al Islam and
Kemuhammadiyah

In this age of information disclosure, our country is confronted with a variety of extreme ideologies. The phenomenon of the rise of the issue of the anti-nationalism movement in several universities aroused the leadership of the Muhammadiyah University of Sidoarjo to take preventive actions with the target of students experiencing changes identical to the characteristics of the radical Islamic movement group. Another preventive measure is to optimize the internalization of kebangsaan values in the material of national insight in the subjects of Al Islam and Kemuhammadiyah III.

This research answers the problem formulation: (1) What is the philosophical basis and historical context of nationalism insight in Muhammadiyah education? (2) What is the process of formulating material on Muhammadiyah's nationality insight in the Al-Islam and Kemuhammadiyahan curriculum? (3) How is the internalization of the values of Muhammadiyah's nationality to actualize the material on the concept of nationalism at Muhammadiyah University, Sidoarjo?

This qualitative research uses a case study with a multidisciplinary approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis is the process of reducing, presenting and verifying data by checking a quality of data using the techniques of persistent observation and triangulation.

The results of this study are, first, the philosophical basis of the concept of nationalism in Muhammadiyah education refers to 7 philosophies of Muhammadiyah. The historical context is seen in the consistency of Muhammadiyah in advancing the nation. Second, the process of formulating national insight material begins with the reconstruction of Al Islam and Kemuhammadiyah III material with Civics through the civic education approach. Al Islam and Kemuhammadiyah III curriculum review needs to be done again in accordance with the formulation of Muhammadiyah *Da>rul 'Ahdi Wa Shaha>dah..* Third, the actualization of material on nationalism insight through the Muhammadiyah business charity program which includes MDMC and LAZIZMU and internal activities through UKM Hizbul Wathan, Muhammadiyah Community Service Community Service Program, and PKM.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II: DASAR FILOSOFIS DAN KONTEKS HISTORIS WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

xix

Bernegara.....	113
B. Arti dan Dinamika Wawasan Kebangsaan.....	115
C. Dasar Filosofis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah.....	124
D. Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah.....	143
BAB III: PERUMUSAN MATERI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KURIKULUM AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	
A. Gerakan Pendidikan Muhammadiyah	
1. Idealisme Pendidikan Muhammadiyah.....	181
2. Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah.....	185
3. Tantangan Pendidikan Muhammadiyah.....	196
B. Materi Wawasan Kebangsaan Muhammadiyah Dalam Kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah	
1. Tinjauan Tentang Kurikulum Perguruan Tinggi.....	202
2. Landasan Pengembangan Kurikulum.....	203
3. Paradigma Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah.....	207
4. Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah.....	216
5. Proses perumusan materi wawasan kebangsaan muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah.....	219
BAB IV: INTERNALISASI NILAI KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH UNTUK MENAKTUALISASIKAN MATERI WAWASAN KEBANGSAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO	
A. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sebagai Institusi Muhammadiyah	
1. Profil Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.....	231
2. Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.....	236
3. Peran Pendidikan al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah.....	237
B. Internalisasi Nilai	
1. Internalisasi Nilai Dalam Pendidikan.....	244
2. Internalisasi Nilai Dalam Kurikulum AIK III.....	247
C. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan	
1. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Internal di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.....	255
2. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Amal Usaha Muhammadiyah.....	271
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	281
B. Implikasi Teoretik.....	285
C. Keterbatasan Penelitian.....	289

A. Latar Belakang Masalah

Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang dikenal sebagai gerakan Islam ‘*amar ma’rūf nahī munkar*, yang berbentuk *tajdid* atau pembaharuan di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan pendidikan. Dalam pengamalannya, Muhammadiyah meyakini Alquran dan Sunnah sebagai sumber pergerakannya. Tafsir atas Alquran diturunkan pada tataran praksis dan diterjemahkan menjadi gerakan nyata. Pada saat Muhammadiyah muncul di panggung sejarah, kondisi masyarakat mengalami kerusakan dalam bidang kepercayaan, kebakuan dalam bidang hukum fikih, kemunduran dalam bidang pendidikan, dan kemiskinan rakyat serta hilangnya rasa gotong royong.¹

¹M. Yunan Yusuf, *Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial* (Jakarta: Uhamka Press, 2005), 85.

Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab III pasal 6 menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.³ Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang tertera dalam Maksud dan Tujuan Muhammadiyah di atas, oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan inklusif dan toleran, solid dan peduli sesama serta mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan dan keharmonisan serta cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk kemudian meminta maaf sehingga *ummah* terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴

² Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah tentang Politik* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 16.

³ PP Muhammadiyah, *Anggaran Dasar Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 5.

⁴ Fatah Wibisono, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya: Kajian Teks*, PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid, 3.

⁴ Fatah Wibisono, *Masyarakat Islam Yang Sebenar-benarnya: Kajian Teks*, PP Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid, 3.

Penafsiran KH Ahmad Dahlan terhadap surat *Al-Ma'un* yaitu terdapat tiga kegiatan utama: pendidikan, kesehatan dan penyantunan orang miskin, serta melakukan transformasi pemahaman keagamaan dari sekadar doktrin-doktrin sakral dan kurang berbunyi secara sosial menjadi kerjasama atau koperasi untuk pembebasan manusia. Dalam konteks inilah teologi kerja Islam doktrin suci yang melampaui absolutisme teologis yang lebih bercorak standar ganda dengan masalah kemiskinan menjadi teologi kerjasama atau (*ta'awanu 'ala al-birri wa at- taqwa*).⁸

⁸Ibid., 161.

Pemikiran KH Ahmad Dahlan tentang Tauhid Al-Ma'un bagi Muhammadiyah ibarat senjata untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia. Karena Tauhid Al-Ma'un merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Muhammadiyah berpandangan bahwa gerakan kemanusiaan merupakan kiprah dalam kehidupan bangsa dan negara dan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.¹³

¹² Ibid.

[illegible]

Peran Muhammadiyah dan para tokohnya dalam mengemban misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah melalui para pemimpinnya terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pada berbagai periode pemerintahan hingga periode reformasi, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan ini lahir dari pesan ajaran Islam yang berkemajuan dan didorong oleh keinginan yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan menjadi negara dan bangsa yang unggul di segala bidang kehidupan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Kiprah dan pengkhidmatan Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad itu merupakan bukti bahwa Muhammadiyah ikut berkorban, dan memiliki saham yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia.¹⁵ Karenanya Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan

¹⁵ Ibid, 9-10.

Muhammadiyah telah memiliki Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikenal dalam bahasa Inggris “*Muhammadiyah Disaster Management Center*” atau disingkat MDMC untuk menguatkan komitmennya untuk visi kemanusiaan yang diterjemahkan ke dalam amal nyata. Lembaga ini dirintis tahun 2007 dengan nama “Pusat Penanggulangan Bencana” yang kemudian dikukuhkan menjadi lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumber daya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010.¹⁹

¹⁸ PP Muhammadiyah, *Pedoman & Panduan Lazizmu; Memberi Untuk Negeri*, 8- 9.

[illegible]

Persyarikatan Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang sarat dinamika yang dihadapi dengan penuh perjuangan sejak dari awal berdirinya. Dalam kehidupan kebangsaan, rumusan pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua menyebut bahwa Muhammadiyah menjadi pilar penting masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, berwawasan kemajemukan, serta bersikap responsif dan kritis kepada pemerintah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Pandangan kebangsaan Muhammadiyah tersebut menegaskan komitmen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta konsisten dalam mengintegrasikan ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an.²¹

²⁰ Ibid.

[illegible]

Penegasan komitmen kebangsaan Muhammadiyah dari sisi pendidikan tinggi perlu direspon positif oleh seluruh penyelenggara dan insan akademika di lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah. Komitmen itu harus mewujudkan pada segenap aktivitas civitas akademika kampus Muhammadiyah/Aisyiyah, termasuk mahasiswa. Tidak ada proses yang paling penting, melainkan melalui pendidikan dan pembelajaran. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengemban misi dakwah Islam ‘*amar ma’rūf nahī munkar*. Misi itu menjadi bagian penting dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Karena itu, seluruh aktivitas pembelajaran di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah harus dapat menjunjung dan menguatkan misi tersebut. Jika lahir dari setiap kampus pemikiran dan penguatan atas komitmen kebangsaan itu, maka harapan pengintegrasian ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an tentu tidak akan mendapat kendala yang berarti.²⁵ Lingkungan Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dalam pergerakan mahasiswanya. Dari situlah mampu memunculkan kombinasi intelektualitas mahasiswa dengan aksi politik-sosial. Kesadaran politik sebagai tingkatan dimana individu memperhatikan perpolitikan

²⁵ Ibid., 209.

Menurut Ardhana Kurniaji, analisa dan penelitiannya tentang mahasiswa dan perubahan sosial, yaitu: (1) Mahasiswa berusaha membawa kenyataan kearah pemikiran tidak kalah pentingnya dengan usaha membawa atau menerapkan pemikiran kearah kenyataan. Meskipun kadang tindakan pragmatis kadang perlu diambil oleh mahasiswa tetapi kiranya tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa apabila tindakan pragmatis tersebut dituntun oleh pandangan (konsep) masa depan yang jelas, tindakan tersebut mempunyai bentuk dan akibat yang jauh berbeda. Inilah yang pada dasarnya membedakan antara tindakan mahasiswa dengan tindakan negarawan maupun tindakan politisi, (2) Mahasiswa melakukan perubahan dalam cara berfikir ilmiah, lebih-lebih bila cara berpikir seperti ini hendak diterapkan pada usaha pembangunan masa depan, baik nasional, regional, ekonomi, sosial ataupun apa saja. Di dalam masyarakat primitif, masa depan memang semata-mata ulangan dari masa sekarang, dan masa sekarang adalah lanjutan belaka dari masa lampau. Sampai sekarang memang selalu ada kebutuhan untuk menggunakan. Pengalaman masa lampau sebagai dasar tindakan dibidang politik, sosial maupun ekonomi. Tetapi kenyataannya membuktikan bahwa pengalaman masa lampau saja tidak cukup, tidak mencukupi lagi, karena Evolusi berjalan begitu cepat, berhubung perubahan-perubahan saling beruntun begitu cepat sehingga pengetahuan, masa lampau tidak lagi sanggup menuntun kita seperti dulu dilakukannya. Dengan merombak cara berpikir ke arah yang lebih ilmiah mahasiswa berharap tidak akan ada lagi kesenjangan sosial,

Maka dari itu identitas mahasiswa harus di arahkan menjadi yang lebih baik karena menurut Klandermans bahwa antisipasi gerakan merupakan bagian dari aksi kolektif yang berakar pada identitas kolektif.²⁷ Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah maraknya isu munculnya gerakan anti nasionalisme di beberapa Perguruan Tinggi. Hal ini menggugah beberapa pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan tindakan preventif dalam pencegahan gerakan radikal tersebut.

Klandermans & Conny Roggeband. *Handbook Of Social Movement Across Disciplenes* (ork: Springer 2007).

²⁷ Bert Klandermans & Conny Roggeband. *Handbook Of Social Movement Across Disciplenes* (New York: Springer 2007).

Muhammadiyah yang berada di Metropolis yang notabene adalah kawasan industri. Percepatan Teknologi dan informasi di kawasan tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap politik kebangsaan mahasiswa. Claasen menyatakan bahwa kemampuan merespon merupakan salah satu fungsi kesadaran politik (yang memudahkan penerimaan), dimana dengan kesadaran yang lebih secara politik dapat merubah keadaan.²⁸

Komitmen Muhammadiyah dalam mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai manifestasi dari rasa kesatuan dan persatuan bangsa dapat terlihat dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang menjadi media transformasi nilai dan ideologi Muhammadiyah melalui lembaga formal

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Melalui mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah 3 (AIK 3), materi mengenai wawasan kebangsaan Muhammadiyah merupakan salah satu pokok bahasan yang akan mendeskripsikan wawasan kebangsaan Muhammadiyah, diantaranya adalah; menjelaskan khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan Muhammadiyah sebagai pendiri NKRI, menjelaskan tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, serta menjelaskan bentuk dan model peran kebangsaan Muhammadiyah.

Di zaman dengan keterbukaan informasi ini negara kita dihadapkan dengan berbagai macam ideologi-ideologi ekstrem lainnya. Pemberian materi kemuhammadiyah diupayakan untuk membentengi mahasiswa terhadap pengaruh ideologi. Sebut saja liberalisme dan komunisme bahkan aliran agama yang ekstrem. Meskipun materi kemuhammadiyah telah diberikan dalam mata kuliah sebagai penguatan ideologi, namun tidak semua mahasiswa akan mempunyai wawasan kebangsaan yang sama terhadap negara atau bahkan materi kemuhammadiyah hanya dipandang sebagai formalitas teori mata kuliah yang harus diampu. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan terhadap kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah yang seharusnya pada beberapa materinya mampu digunakan sebagai acuan untuk untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap serta nilai-nilai wawasan kebangsaan.

Gerakan-gerakan radikal yang selama ini telah ada mencoba membuat metamorfosa dengan merekrut mahasiswa, sebagai kalangan terdidik. Dengan

Adapun ciri-ciri lebih detail terkait kelompok-kelompok gerakan Islam di kampus diantaranya, biasanya bagi laki-laki memanjangkan jenggot (yang dianggap sebagai bagian dari sunnah nabi), memakai celana cingkrang dan baju gamis atau koko, dan menghitamkan jidad. Sedangkan untuk perempuan, mengenakan jilbab panjang, dan mengenakan cadar, ada juga yang mengenakan masker kain. Biasanya mereka memanggilnya dengan sebutan *ana* untuk saya dan *antum* untuk anda. *Ikhwan* untuk laki-laki dan *akhwat* untuk perempuan.

[illegible]

Proses internalisasi yang diawali dengan proses perumusan kurikulum materi wawasan kebangsaan dalam matakuliah Al Islam dan kemuhammadiyah III belum pernah dikaji secara mendalam di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang selanjutnya untuk dijadikan sebuah perbaikan pada kurikulum yang disusun oleh Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat memilih program untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam kegiatan-kegiatan praktis. Bahkan aktualisasinya tidak terikat waktu. Meskipun proses internalisasi nilai dalam pemberian materi wawasan kebangsaan dilaksanakan pada semester 3, namun aktualisasinya tidak terbatas waktu. Bahkan sampai pada semester akhir pun mahasiswa masih konsisten dalam mengikuti program tersebut. Hal ini merupakan indikasi bahwa tingkat kedalaman nilai yang terinternalisasi dalam diri mahasiswa berbeda.

Melalui visi besarnya, yang berbunyi “Menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Diantara masalah-masalah yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Perbedaan tentang konsep bentuk negara

- dan Kemuhammadiyahan
bangsaan Muhammadiyah
bangsaan di Universitas M

beberapa kegelisahan akademik tersebut, pen
kannya dalam rumusan masalah. Namun dala
perlu ditentukan batasan masalahnya agar tidak b

penelitian ini, yaitu:

- kebangsaan dalam pe
wawasan kebangsa
ri wawasan kebangsa
Kemuhammadiyah.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dan perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan pendalaman, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- #### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah
2. Mendeskripsikan proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyahan

3. Menganalisis Internalisasi nilai kebangsaan Muhammadiyah untuk mengaktualisasikan materi wawasan kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

E. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi tentang Dasar Filosofis Serta Konteks Historis Wawasan kebangsaan Dalam Kurikulum Al Islam Dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoretis maupun praktis, berikut ini:

1. Manfaat Teoretis

Studi ini diharapkan dapat mengelaborasi dan mengungkap wawasan kebangsaan muhammadiyah. Studi ini hendak menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara telah melakukan gerakan praksis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Studi ini juga hendak menunjukkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen dalam wawasan kebangsaan seperti yang tertera dalam kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sehingga memberikan kontribusi penting kepada bangunan pemikiran mahasiswa tentang wawasan kebangsaan.

Pada dimensi teoretis akademis, hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan serta memperkaya khazanah kajian ilmiah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan Muhammadiyah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *best practice* bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikannya khususnya dalam materi wawasan kebangsaan pada matakuliah Al Islam dan kemuhammadiyah III.

Bagi Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penelitian ini sebagai pertimbangan untuk melakukan peninjauan dan re-desain kurikulum materi kebangsaan dalam matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan III demi meningkatkan kualitas pendidikan Al Islam dan kemuhammadiyahan.

Bagi para pemerhati pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk penelitian lebih lanjut maupun menjadi dasar pertimbangan untuk mengembangkan dialog yang intensif mengenai wawasan kebangsaan Muhammadiyah.

F. Kerangka Teoritik

1. The Society Oriented Curriculum

Desain pengembangan kurikulum merupakan konstruksi dari proses pengembangan kurikulum, yang mempunyai jenis-jenis berbeda di dalamnya. Menurut Oemar Hamalik, desain kurikulum merupakan suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan ²⁹ Desain kurikulum diharapkan dapat mengembangkan watak, kepribadian dan nilai-nilai demokrasi yang terinternalisasi dalam diri.

²⁹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 154.

a. Perspektif status quo (*the status quo perspective*)

Kegiatan-kegiatan utama dalam masyarakat yang disarankan untuk menjadi isi kurikulum adalah kegiatan bahasa atau komunikasi sosial; kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan; kegiatan dalam kehidupan sosial seperti bergaul dan berkelompok dengan orang lain; kegiatan menggunakan waktu senggang dan menikmati rekreasi; usaha menjaga kesegaran jasmani dan rohani; kegiatan yang berhubungan dengan religius; kegiatan yang berhubungan dengan peran orang tua seperti membesarkan anak; memelihara kehidupan keluarga yang harmonis; kegiatan praktis yang bersifat vokasional atau keterampilan tertentu; dan melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat seseorang.³²

³² Ibid., 157.

individu. Adapun tokoh perpektif ini adalah Harold Rug.³⁵

Ada tiga kriteria yang harus diperhatikan dalam proses mengimplementasikan kurikulum ini. Ketiganya menuntut pembelajaran nyata (real), berdasarkan pada tindakan (action), dan mengandung nilai (values). Ketiga kriteria tersebut adalah pertama, mahasiswa harus memfokuskan kepada salah satu aspek yang ada di masyarakat yang dianggapnya perlu untuk diubah. Kedua, mahasiswa harus melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat itu. Ketiga, tindakan mahasiswa harus didasarkan kepada nilai (values), apakah tindakan itu patut dilaksanakan atau tidak, apakah memerlukan kerja individual atau kelompok atau bahkan keduanya.³⁶

Dengan kerangka desain pengembangan kurikulum diatas, diharapkan bisa memperbaiki kualitas capaian pembelajaran. Namun yang menjadi unjuk tombak keberhasilan dari implementasi kurikulum adalah pengajar. Desain kurikulum harus mempertimbangkan beberapa hal yang meliputi: pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi alamnya; kedua, pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; ketiga, kurikulum harus berisikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan disesuaikan dengan budaya nasional dan daerah; keempat, kurikulum harus mampu mengantisipasi perubahan sosial dalam masyarakat; dan kelima, kurikulum harus memuat nilai-nilai agama.³⁷

³⁵ Ibid., 156.

³⁶ Nana Syaodih. S, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, 173.

³⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 151.

⁴¹ Hornsby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxford: Oxford University Press, 1995), 624.

b. *Responding* (Menanggapi)

Yaitu tahap mulai memberikan tanggapan terhadap rangsangan afektif yang meliputi: *Compliance* (manut), secara aktif memberikan perhatian dan *satisfaction is respons* (puas dalam menanggapi). Tahap ini seseorang mulai aktif dalam menanggapi nilai yang berkembang di luar dan meresponnya.

c. *Valuing* (Memberi Nilai)

Yaitu tahap mulai memberikan penilaian atas dasar nilai-nilai yang terkandung didalamnya yang meliputi: Tingkatan percaya terhadap nilai yang diterima, merasa terikat dengan nilai-nilai yang dipercayai dan memiliki keterikatan batin (*commitment*) untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diterima dan diyakini itu.

d. *Organization* (Mengorganisasikan Nilai)

Yaitu mengorganisasikan berbagai nilai yang telah diterima yang meliputi: Menetapkan kedudukan atau hubungan suatu nilai dengan nilai lainnya. Misalnya keadilan sosial dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Serta dengan mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya yakni cara hidup dan tata perilaku sudah didasarkan atas nilai-nilai yang diyakini.

e. Penyaturagaan nilai dalam suatu sistem nilai yang konsisten meliputi:

Generalisasi nilai sebagai landasan acuan dalam melihat dan memandang masalah yang dihadapi, dan tahap karakterisasi.⁴⁴

⁴⁴ Soedijarto. *Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 145-146.

Pendidikan dalam kerangka demokrasi dijelaskan bahwa pertama, pendidik sebagai fasilitator, yaitu pendidik harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Kedua, pendidik sebagai dinamisator, yaitu pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Ketiga, pendidik sebagai mediator, yaitu pendidik harus memberikan rambu-rambu agar peserta didik bebas berekspresi. Keempat, pendidik sebagai motivator, yaitu pendidik harus selalu memberikan dorongan kepada peserta didik agar bersemangat dalam menuntut ilmu.⁴⁸

Beberapa pandangan yang berkaitan dengan konsep demokrasi pendidikan menurut John Dewey, di antaranya adalah: *Education as a necessity of life*, *Education as a social function*, *Education as Direction*, *Education as growth*,

⁴⁸ Ibid, 83-89.

⁵² Ibid.

John Dewey menyatakan bahwa ” *preparing or getting ready for some future duty or privilege*”, pendidikan adalah mempersiapkan atau mendapatkan kesiapan untuk banyak tugas atau tanggung jawab mendatang. “*Educative process is a continuous process of growth, having as its aim at every stage an added capacity of growth. This conception contrasts sharply with other ideas which have influenced practice.*” Dewey menambahkan bahwa proses edukatif adalah proses pertumbuhan yang berkesinambungan, yang mempunyai tujuan pada setiap tahap kapasitas pertumbuhan.⁵⁴

⁵³ John Dewey, *Democracy and Education*, 62-63.

[illegible]

⁵⁶ Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John Dewey*, 86.

kebiasaan-kebiasaan sosial dan dirubah tanpa memperkenalkan kekacauan.⁵⁷

John Dewey menyatakan bahwa konsep demokrasi dalam pendidikan adalah kebebasan dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan individu lebih didominasi oleh hasrat alamiah yang tinggi dan mampu memunculkan rasa kasih sayang, keramahan, serta beberapa watak yang menonjol. Hasrat alami akan membuat individu menjadi sosok warga negara yang baik yang akan menjadi pembela bagi negaranya. Tapi keterbatasan mereka dalam berhubungan dengan kekurangan-kekurangan yang merupakan sebuah kapasitas yang digenggam secara universal telah menjadikan mereka jauh akan nilai-nilai tersebut.⁵⁸

Pengalaman dan kebebasan merupakan alat emosional dalam menumbuhkan hasrat dalam diri manusia. Salah satu bentuk kebebasan yang penting adalah kebebasan intelegensi yaitu kebebasan observasi yang dilakukan atas sejumlah tujuan yang hakekatnya berharga. Kekeliruan yang paling sering dilakukan terhadap kebebasan adalah menyamakannya dengan kebebasan bergerak atau sisi dengan sisi eksternal atau fisik dari kegiatan. Namun sisi eksternal atau fisik dari kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sisi internal kegiatan yaitu kebebasan berfikir, berkeinginan dan bertujuan.⁵⁹

⁵⁷ Ibid., 87.

⁵⁸ Ibid., 119.

G. Studi Terdahulu

Studi tentang wawasan kebangsaan Muhammadiyah telah banyak dilakukan oleh para sarjana. Di sini dikemukakan beberapa studi yang telah dilakukan tentang tema-tema tersebut terutama yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan Muhammadiyah serta tema-tema lain yang relevan dari berbagai sumber, antara lain:

1. Natal Kristiono dalam artikelnya yang berjudul Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang menganalisis permasalahan seberapa besar tingkat pengetahuan dan pemahaman Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa dan bagaimana solusi untuk menguatkan kembali Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti melalui angket atau kuesioner. Hasil penelitian nya adalah hampir seluruh responden mengamalkan nilai -nilai Pancasila. Solusi yang dapat dilakukan untuk menguatkan kembali Ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa yaitu dengan menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila yang dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku antara lain; menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara, berusaha memahami makna Pancasila, nilai Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara, mempertahankan Pancasila agar tetap lestari, menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, serta menetapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁹

⁵⁹ Natal Kristiono, “Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang”, *Harmony*, Vol 2 No 2 , 193-204.

2. Taufik Mauhtarom dan Danuri pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan tema Analisis Wawasan Kebangsaan Melalui Buku Teks Kelas Rendah Sekolah dasar Kurikulum Tematik 2013. Penelitian ini mendeskripsikan muatan nilai-nilai wawasan kebangsaan pada buku teks siswa kelas SD kelas rendah Kurikulum 2013 pada bagian wacana, petunjuk kerja, tagihan kerja, dan evaluasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik kajian isi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa *study literature*.

Langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan menganalisis konten buku teks tematik siswa SD kelas rendah Kurikulum 2013. Adapun analisis datanya menggunakan analisis deskriptif - interpretatif melewati proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam aspek dari nilai wawasan kebangsaan yang tercakup dalam buku teks tematik siswa kelas rendah sekolah dasar diantaranya adalah aspek kesetiakawanan sosial dengan rincian sebanyak 23%, aspek Demokrasi dan kedaulatan rakyat sejumlah 11%, aspek cinta tanah air dengan prosentase 19%, aspek penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sebanyak 17%, aspek tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan bersatu sebanyak 17%, serta aspek masyarakat adil dan makmur dengan prosentase 14%. Keenam aspek tersebut diajarkan melalui pembiasaan sikap dalam setiap aktivitas belajar baik sebelum, saat, maupun setelah pembelajaran di kelas, penanaman sikap melalui cerita dan muatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik partisipant observation, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi, penyajian dan diakhiri dengan verifikasi. Analisis data dilakukan secara terus menerus semenjak awal hingga akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* dilatarbelakangi oleh munculnya propaganda bahwa Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya ada tiga unsur penting dalam pendidikan wawasan dengan pendekatan bayani. Pertama, bahan ajar yaitu teks kitab *Mitsaq al-Madinah* atau kitab pancasila. Kedua, metode pembelajaran dengan bandongan, hafalan, dan takraran. Dan ketiga, tujuan pembelajaran yaitu pemahaman yaitu pemahaman, hafalan dan sikap.⁶¹

⁶¹ Fathur Rohman, "Pendidikan Wawasan Kebangsaan Dengan Pendekatan Bayani Di Pondok Pesantren darul Falah Bangsri Jepara," *Edukasia*, Vol. 13, No 1, Februari 2018, 53-61.

SMA A, SMA B dan SMA C, dengan kekuatan hubungan antara variabel adalah lemah/kecil.⁶⁴ .

7. Rudi Salam, dalam artikelnya tahun 2017 yang berjudul “Efektifitas Penanaman Nilai- Nilai Kebangsaan Melalui Metode Karyawisata Dalam Pembelajaran Sejarah.” Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan proses pembelajaran sejarah melalui metode karyawisata, 2) mengetahui efektivitas pembelajaran sejarah melalui metode karyawisata, 3) mengetahui respon siswa terhadap proses pembelajaran sejarah melalui metode karyawisata dalam meningkatkan nilai-nilai kebangsaan. Subjek siswa kelas XII IPS SMAN 14 Semarang sebanyak 30 siswa dilakukan treatment pembelajaran sejarah metode Studi Karyawisata ke Museum Perjuangan Kodam IV/Diponegoro Mandala Bhakti Semarang. Variabel yang diteliti adalah: 1) nilai kebangsaan yang terdiri dari 21 aspek, yang diukur melalui kuesioner. 2) respon siswa terhadap pembelajaran diukur dengan kuesioner. Analisis data menggunakan paired sample t-test, uji gain dan uji mean dengan taraf signifikansi 5%. Penanaman nilai kebangsaan dalam proses pembelajaran melalui metode karyawisata dilakukan tiga tahap yaitu: 1) diskusi materi di kelas, 2) melakukan kunjungan ke museum, 3) diskusi hasil kunjungan dan pembuatan laporan. Proses pembelajaran tersebut efektif meningkatkan nilai-nilai kebangsaan ($p = 0,000$). Respon siswa terhadap pembelajaran tergolong sangat tinggi.⁶⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan multidisipliner (*Multidisciplinary approach*) merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan tegas dikemukakan

c. Jenis dan Sumber Data

Sedangkan jenis data tidak tertulis bisa berupa suara, yang merupakan data hasil rekaman yang berupa tanggapan, pemikiran atau pandangan sumber data dalam penelitian. Data suara ini berupa alat perekam yang menyimpan suara informan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan penelitian yang meliputi Tokoh-tokoh

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan pengamatan dalam penelitian ini, sebelumnya peneliti mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian utamanya pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian. Observasi dilaksanakan dengan menggunakan pancaindera yang meliputi penglihatan dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah internalisasi nilai kebangsaan dalam materi Al Islam dan Kemuhammadiyah dan aktualisasinya. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana yang berkaitan dengan internalisasi nilai kebangsaan dalam materi Al Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo serta aktualisasinya di program internal dan eksternal.

[illegible]

Dari segi instrumentasi yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis observasi tidak terstruktur karena melakukan pengamatan tanpa menggunakan instrumen. observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, namun hanya berupa rambu-rambu pengamatan dan memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Peneliti melakukan pengamatan sedalam-dalamnya tentang fokus penelitian tanpa ada batasan kisi-kisi instrumen dari observasi. Dari pengamatan itulah kemudian peneliti berhak memberikan tambahan-tambahan fakta berdasarkan subyektifitasnya sendiri. Untuk kepentingan itulah kemudian peneliti dituntut untuk secepatnya membuat laporan-laporan atau membuat catatan-catatan akan hasil pengamatan secara terlibat.

Metode observasi ini menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survey tentang dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah. Observasi dapat mencatat hal-hal atau perilaku pada waktu kejadian itu berlangsung, dan datanya pun dapat diperoleh secara langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkenaan dengan kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah dan aktualisasinya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, yang diamati oleh peneliti adalah tingkah laku, kondisi atau situasi dari:

Muhammadiyah untuk negeri dan program kreativitas mahasiswa.

- 6) Program eksternal kampus; pengamatan dilakukan pada program eksternal kampus untuk mengetahui atau menambahkan data tentang Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program amal usaha Muhammadiyah yang meliputi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZIZMU) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

b. Wawancara (*Interview*)

Untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian, penelitian ini menggunakan teknik interview. Teknik ini diperlukan untuk mendapatkan data-data langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan. Teknik wawancara dalam penelitian ini disesuaikan dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya namun pedoman wawancara tentang masalah-masalah pokok dalam penelitian dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam pencarian data penelitiannya, peneliti memprediksi bahwa nantinya akan memungkinkan adanya pengulangan-pengulangan dalam proses wawancara terhadap informan untuk memperoleh data yang akurat. Untuk menjaga konsistensi pertanyaan, peneliti membuat sebuah pedoman wawancara yang hanya berisi garis besar tentang hal-hal yang menjadi fokus permasalahan sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan wawancara dan bisa dikembangkan namun tetap fokus pada permasalahan. (terlampir)

Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 kurikulum AIK Majelis Pendidikan Tinggi PP Muha
 perkembangan kurikulum Al Islam dan Kemuhan
 rumusan materi wawasan kebangsaan di Pe
 diyah.
 ndayani, S.Ag.,M.Pd.I (l. 1979) ; menjabat sebag
 Asosiasi Lembaga Al Islam dan kemuhammadiyah
 mpinan Pusat Muhammadiyah Interview ini
 i data tentang Pendidikan Al Islam dan Kemuhan
 an Tinggi Muhammadiyah, paradigma pendidika
 Muhammadiyah, perkembangan kurikulum A

- Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 kurikulum AIK Majelis Pendidikan Tinggi PP Muha
 perkembangan kurikulum Al Islam dan Kemuhan
 rumusan materi wawasan kebangsaan di Pe
 diyah.
 ndayani, S.Ag.,M.Pd.I (l. 1979) ; menjabat sebag
 Asosiasi Lembaga Al Islam dan kemuhammadiyah
 mpinan Pusat Muhammadiyah Interview ini
 i data tentang Pendidikan Al Islam dan Kemuhan
 an Tinggi Muhammadiyah, paradigma pendidika
 ndiyahan, perkembangan kurikulum A

sebagaimana, nilai-nilai apa sajakah yang terinternalisasi oleh mahasiswa Muhammadiyah, sejauhmana antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kegiatan internal kampus dan kegiatan eksternal melalui program kepramukaan Muhammadiyah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, literatur dalam penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menelusuri kepustakaan yang berisi teori-teori dari kepramukaan Muhammadiyah maupun *hard copy* yang ada pada buku, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dasar filosofis dan kepramukaan Muhammadiyah. Teknik literer ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam menganalisa permasalahan kepramukaan Muhammadiyah.

sebagaimana, nilai-nilai apa sajakah yang terinternalisasi oleh mahasiswa Muhammadiyah, sejauhmana antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kegiatan internal kampus dan kegiatan eksternal melalui program keagamaan Muhammadiyah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, literatur dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri kepustakaan yang berisi teori-teori dari keagamaan Muhammadiyah, baik *hard copy* maupun *hard copy* yang ada pada buku, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dasar filosofis dan keagamaan Muhammadiyah. Teknik literer ini digunakan untuk menganalisa data primer dalam menganalisa permasalahan.

sebagaimana, nilai-nilai apa sajakah yang terinternalisasi oleh mahasiswa Muhammadiyah, sejauhmana antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kegiatan internal kampus dan kegiatan eksternal melalui program keagamaan Muhammadiyah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, literatur dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri kepustakaan yang berisi teori-teori dari keagamaan Muhammadiyah, baik *hard copy* maupun *hard copy* yang ada pada buku, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dasar filosofis dan keagamaan Muhammadiyah. Teknik literer ini digunakan untuk menganalisa data primer dalam menganalisa permasalahan.

kebangsaan, nilai-nilai apa sajakah yang terinternalisasi oleh mahasiswa Muhammadiyah, sejauhmana antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kegiatan internal kampus dan kegiatan eksternal melalui program keorganisasian Muhammadiyah.

Untuk memperoleh data yang akurat, literatur dalam penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi dan menelusuri kepustakaan yang berisi teori-teori dari keorganisasian Muhammadiyah maupun *hard copy* yang ada pada buku, laporan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan dasar filosofis dan keorganisasian Muhammadiyah. Teknik literer ini digunakan untuk memperoleh data primer dalam menganalisa permasalahan keorganisasian Muhammadiyah.

Dokumenter sebagai teknik pengumpul data sekunder dalam rangka melengkapi data hasil interview dan hasil observasi. Sebagai metode pengumpulan data penelitian, teknik dokumentasi memiliki kelebihan efisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya. Namun peneliti harus menganalisa validitas dan reabilitasnya. Data dokumentasi dalam penelitian ini bisa berupa catatan maupun foto kegiatan yang berkaitan dengan:

- 1) Dokumentasi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan pandangan konsep kebangsaan di Indonesia yang berupa data jumlah amal usaha Muhammadiyah khususnya data mengenai lembaga pendidikan yang berkembang di Muhammadiyah.
- 2) Dokumentasi proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah yang meliputi deskripsi perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah III, Silabus dan RPS mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah III.
- 3) Dokumentasi kegiatan yang merupakan aktualisasi dari kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam menginternalisasikan nilai kebangsaan Muhammadiyah yang meliputi data mahasiswa yang terdaftar dalam peserta Latgab MDMC serta data jumlah jenis PKM yang telah diupload di Dikti.

Dalam penelitian ini, Instrumen pengumpulan datanya berupa angket atau kuesioner, interview guidance, instrumen observasi dan instrumen dokumentasi. Angket atau kuesioner merupakan instrumen pengumpul data yang berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya mengenai wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen dalam penelitian ini, meliputi:

- Interview guidance merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai pedoman melakukan wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian ini, interview dilakukan secara bebas terpimpin artinya pewawancara bebas menanyakan yang menjadi permasalahan dalam wawasan kebangsaan kepada informan dengan hanya membawa pedoman garis besarnya saja tanpa lembar pedoman yang berisi pertanyaan lengkap. Kekuatan interview terletak pada keterampilan interviewer dalam melakukan tugasnya. interviewer harus membuat suasana yang tenang dan nyaman agar sumber data dapat memberikan informasi yang jujur sehingga menghasilkan mengeluarkan informasi yang akurat.

Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti mencari kembali data yang diperlukan. Proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung.

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mampu dipahami dan memiliki makna tertentu. Data-data tentang Dasar Filosofis dan Konteks Historis Wawasan kebangsaan dalam Kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah ditampilkan yang selanjutnya membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

1) *Presistent Observation* (Ketekunan Pengamatan) yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini berkaitan dengan aktualisasi Kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data tentang Dasar Filosofis dan Konteks Historis Wawasan kebangsaan dalam Kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah di Universitas Muhammadiyah

Disertasi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab memberikan fokus perhatian pada bahasan tertentu, sesuai dengan tema pokok penelitian disertasi ini.

Bab kedua, Muhammadiyah: Dasar Filosofis Dan Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah. Pertama, berisi uraian tentang Muhammadiyah: Sejarah Dan Konteks Kebangsaannya, yang meliputi: Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah, Orientasi Ideologi Muhammadiyah, Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara serta Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah Tentang Kebangsaan. Kedua, menjelaskan tentang Dasar Filosofis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah dan ketiga, Konteks Historis Wawasan Kebangsaan Dalam Pendidikan Muhammadiyah.

[illegible]

Bab Keempat, Internalisasi Nilai Kebangsaan Muhammadiyah Untuk Mengaktualisasikan Materi Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pertama, menjelaskan tentang Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Sebagai Institusi Muhammadiyah, yang meliputi Profil Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan Peran Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Kedua, berisi tentang internalisasi Nilai yang meliputi: Internalisasi nilai dalam pendidikan dan internalisasi nilai Kebangsaan dalam kurikulum AIK III. Ketiga, menjelaskan tentang aktualisasi materi wawasan kebangsaan yang meliputi: Aktualisasi materi wawasan kebangsaan melalui program internal universitas Muhammadiyah dan aktualisasi materi wawasan kebangsaan melalui program amal usaha Muhammadiyah.

[illegible]

Setelah kepulangan beliau dari Makkah, KH Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mendirikan persyarikatan yang dilatarbelakangi oleh keadaan ummat Islam yang pada waktu itu dalam keadaan jumud dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Beliau ingin mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam berdasarkan Qur`an dan Hadist. Kelahiran Muhammadiyah merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji KH Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, KH Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah Air.

⁴ Hidayatullah, Wawancara, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

“Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh KH Ahmad Dahlan didasarkan pada sebuah pemahaman tentang konsep agama yang Beliau pelajari dan melihat fenomena kehidupan masyarakat khususnya di Kauman Yogyakarta yang memperlihatkan sebuah fakta bahwa kehidupan masyarakat di kauman sangat jauh dengan kemuliaan Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan. Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan adalah Islam yang penuh dengan kemajuan. Tetapi dalam kehidupan di Kauman faktanya berbalik. Disana banyak orang yang miskin, orang tidak berpendidikan yang bagus, dan cukup banyak orang yang sakit.”⁵

Latar belakang lahirnya Muhammadiyah meliputi dua faktor, yakni Faktor Subjektif dan Obyektif.

Faktor subyektif ini adalah faktor yang berkaitan pribadi Ahmad Dahlan,

[illegible]

b. Faktor Obyektif

Faktor Obyektif merupakan fakta riil yang menimpa umat dan bangsa Indonesia pada waktu itu. Faktor Obyektif ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu internal dan Eksternal. Faktor Obyektif dari segi internal, antara lain:

Kelemahan praktek ajaran Islam. Bentuk- bentuk kelemahan praktek ajaran agama Islam yang menjadi latarbelakang berdirinya Muhammadiyah, meliputi:

- 1) Tradisionalisme Pemahaman dan praktek Islam tradisionalisme; Hal ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup pintu ijtihad dan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang agama. Paham dan praktek agama seperti ini mempersulit agenda ummat untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan baru yang banyak datang dari luar (barat). Bentuk-bentuk sikap penolakan terhadap perubahan dan kemudian berapologi terhadap kebenaran tradisional yang telah menjadi pengalaman hidup menjadi manifestasi dari kegagalan dalam melakukan adaptasi perkembangan.
- 2) Sinkretisme Pertemuan Islam dengan budaya lokal; Hasil dari pertemuan tersebut disamping telah memperkaya khasanah budaya Islam, namun juga telah melahirkan format-format sinkretik, percampuradukkan antara sistem kepercayaan asli masyarakat dengan budaya setempat. Hal ini terkadang menimbulkan persoalan yang telah menyimpang dari tinjauan aqidah Islam dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang Jawa misalnya, meski secara formal mengaku sebagai muslim, namun kepercayaan terhadap agama asli

- sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Faktor Kristenisasi; Faktor yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan, menjadi kristen. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kolonialisme Belanda. Misi Kristen, baik Katolik maupun Protestan di Indonesia, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Konstitusi Belanda. Bahkan kegiatan-kegiatan kristenisasi ini didukung dan dibantu oleh dana-dana negara Belanda. Efektifitas penyebaran agama Kristen inilah yang terutama menggugah KH Ahmad Dahlan untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan.

[illegible]

Dengan melihat seluruh latar belakang kelahiran Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan telah melakukan lompatan besar dalam berijtihad. Prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah tetap berpijak kuat pada al-Quran dan Sunnah, namun implementasi dalam operasionalisasinya yang memiliki karakter dinamis dan terus berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

⁶Mustafa Kemal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: Perspektif Historis dan Ideologis* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003), 120-130.

Etika *welas asih* menjadi pijakan teologi reformasi KH Ahmad Dahlan dalam hal kepeduliannya pada nasib bangsa dan umat Islam penduduk pribumi yang sengsara dan tertindas.⁷ Fenomena ini menarik elit priyayi Jawa Sutomo, sehingga beliau bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah di

⁷ Abdul Munir Mul Khan, *Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kyai KH Ahmad Dahlan* (Jakarta: Bentara, Kompas, 2005), 2. Mul Khan mengomentari gerakan yang dilakukan Dahlan, bahwa Gagasan dasar Dahlan terletak pada kesejajaran kebenaran tafsir al-Qur'an, akal suci, temuan iptek, dan pengalaman universal kemanusiaan. Belajar filsafat baginya adalah kunci pengembangan kemampuan akal suci, dari sini diperoleh pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan penerapan ajaran Islam. Realisasi tujuan tersebut dilakukan dengan mendirikan sekolah modern, rumah sakit, kepanduan, panti asuhan, dan pemberdayaan kaum tertindas dalam sistem manajemen dan organisasi modern. Berbagai ritus Islam difungsikan sebagai dasar teologi realisasi tujuan tersebut. Dari kehidupan kaum nasrani dan temuan iptek, kyai belajar tentang pengembangan kehidupan sosial. Dari tokoh-tokoh pembaharu, ia peroleh ide rasionalisasi ajaran Islam. Sementara dari fakta-fakta sosiologis dan sejarah manusia, diperolehnya inspirasi kerja pragmatis dan humanis.

bidang kesehatan. Bahkan kemudian, bersama-sama para dokter Belanda, Sutomo mengelola Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya tanpa gaji. Semangat kemanusiaan berbasis cinta kasih telah mempersatukan mereka meskipun berbeda bangsa dan agama.

Komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam berbasis akidah yang murni. Hal ini menjadi khittah Muhammadiyah sekaligus menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaannya. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa latar belakang berdirinya Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Walaupun pada saat itu sudah ada sekolah-sekolah, namun belum merata diseluruh pelosok. Padahal pendidikan dan pengajaran adalah unsur yang mutlak untuk meninggikan kecerdasan rakyat. Itulah sebabnya Muhammadiyah sangat mementingkan pendidikan dan pengajaran di samping gerakan keagamaan tentunya. Untuk meningkatkan pendidikan pemuda, dibentuk organisasi kepanduan Hisbul Wathon. Untuk meningkatkan pendidikan dan kecakapan wanita. Muhammadiyah membentuk organisasi Aisyah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemudi- pemudi Aisyah membentuk Naswiatul Aisyah.

Sebagai gerakan yang senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan, Muhammadiyah senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi-munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya ialah masyarakat,

sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT.

2. Orientasi Ideologi Muhammadiyah

Dalam konstelasi global berbagai paham dan model gerakan Islam tumbuh di hampir seluruh dunia muslim. Perkembangan hidup umat manusia semakin menunjukkan kecenderungan yang luar biasa di berbagai aspek, yang disertai dengan semakin meluasnya kekuatan berbagai jenis ideologi yang merasuk ke seluruh struktur kehidupan bangsa. Ideologi Muhammadiyah bersumber dari pemikiran poendiri dan tokoh-tokoh generasi awal Muhammadiyah. Proses perumusan ideologi Muhammadiyah terus berlangsung seiring dengan kebutuhan organisasi untuk menjawab permasalahan yang muncul pada setiap masa perkembangan Muhammadiyah.

Ideologi Muhammadiyah dapat dipahami dari rumusan-rumusan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Masalah Lima, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, dan Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah: Konsolidasi Bidang Keyakinan dan Cita-Cita Hidup. Rumusan ideologi Muhammadiyah bersifat tentatif dan dinamis agar eksistensi organisasi tetap dipertahankan.

Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan baru dalam kehidupan umat, bangsa dan dunia kehidupan yang sarat tantangan, sehingga Muhammadiyah tidak

Hidayatullah dalam keterangannya juga menyampaikan bahwa perjuangan KH. KH Ahmad Dahlan dan teman-temannya adalah perjuangan yang tidak pernah selesai. Karena dalam perumusan resmi di Muhammadiyah adalah ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁹

⁹Hidayatullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

Menurut pandangan Muhammadiyah, ideologi dapat diartikan sebagai sistem paham yang berfungsi untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat. Sebagai *religious movement*, yang didalamnya terkandung *belief system, knowledge, organization, dan practices activity* yang mengarah pada tujuan yang dicita-citakan.¹² Muhammadiyah sebagai organisasi maupun gerakan secara keseluruhan memerlukan perekat sebagai fondasi untuk menjaga kesinambungan gerakan Muhammadiyah. Pemikiran ideologi secara substansi terkandung dalam dua pemikiran resmi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah serta Matan keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah.¹³

¹⁰ Hidayatullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

¹¹ Saad Ibrahim, *Wawancara*, Sidoarjo, 13 Desember 2019.

¹² Haedar Nashir, *Meneguhkan Gerakan Ideologi Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 5.

¹³ Muhammad Junaidi, dkk, “Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah Dalam Penguatan Kader Persyarikatan”, *Tajdid*, Vol. 16, No. 2 (Desember. 2018), 104.

¹⁴ al-Qur'an, 3:104.

Misinya adalah mencerdaskan masyarakat. Muhammadiyah berdiri pada saat bangsa Indonesia masih terjajah, ekonominya lemah, pendidikannya rendah termasuk kesehatannya. Muhammadiyah ingin memperbaiki bidang tersebut sehingga dalam perjalanannya Muhammadiyah selalu berkomitmen untuk menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.¹⁵

Seiring dengan pentingnya menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan Muhammadiyah secara keseluruhan, Muhammadiyah menetapkan langkah revitalisasi ideologi hasil Tanwir 2007 di Yogyakarta. Sejak reformasi banyak aliran-aliran dan gerakan Islam lain yang masuk dan melakukan aktivitas ditubuh organisasi dan amal usaha Muhammadiyah.¹⁶ Berdasarkan pada kenyataan ini dan agar tidak menimbulkan dampak luas dan merugikan masa depan Muhammadiyah, maka dikeluarkanlah kebijakan revitalisasi ideologi. Sikap ideologis ini bukan berarti Muhammadiyah anti ukhuwah, tetapi sebaliknya agar ukhuwah tercipta, maka sesama organisasi Islam seharusnya tidak saling intervensi.

Dalam pandangan akademik, para ahli sering mengkategorisasikan ideologi Muhammadiyah sebagai berikut:

a. Ideologi Modernis-Reformis

Para penulis dan peneliti maupun masyarakat menjuluki Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern, reformis, dan lebih spesifik lagi disebut gerakan Tajdid atau pembaruan. Alfian menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan

¹⁵ Najib Hamid, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2020.

¹⁶ Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, 39.

¹⁷ Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996); Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989); Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, (Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2002); Ahmad Syafii Maarif, *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, (Yogyakarta: Sipress, 1990); James L. Peacock, *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam*, (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986); Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: a Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*, (Institute of Southeast Asian Studies, 1983). William Shepard, "The Diversity of Islamic Thought: Towards a Typology", dalam Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi, *Islamic Thought In The Twentieth Century*, (New York; IB. Tauris & Co Ltd., 2004).

'Aisyiyah yang menjadi ciri khas pemikiran dan amal KH Ahmad Dahlan.¹⁹

Shepard dalam Suha-Taji-Farouki & Basheer M. Nafi, mengategorisasikan Muhammadiyah sebagai kelompok "*Islamic-Modernism*", yang lebih fokus bergerak untuk membangun "*Islamic society*" (masyarakat Islam) daripada perhatian terhadap "*Islamic state*" (negara Islam); yang fokus gerakannya pada bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, serta tidak menjadi organisasi politik kendati para anggotanya tersebar di berbagai partai politik.²⁰ Pandangan modernis tersebut berbeda dengan pandangan sekular yang memisahkan agama secara diametral dari negara atau sebaliknya pandangan fundamentalisme-Islam yang menghimpitkan secara sama sebangun antara agama dan negara.

Dalam konteks sejarah Indonesia, pandangan Muhammadiyah ini menjadi penting karena selain ikut menyelesaikan ketegangan antara Islam dan negara sebagaimana terjadi pada awal kemerdekaan dalam peristiwa Piagam Jakarta, sekaligus memberikan solusi keagamaan dalam kenegaraan yakni menjadikan Indonesia sebagai format negara yang sah yang berdasarkan Pancasila dan memiliki legitimasi secara teologis dan aspek sosiologis yang kuat untuk menjadikan negara Indonesia *baldatun tayyibatun wa rabbun qhafur*.

Secara umum orientasi ideologi keagamaan reformis-modernis ditandai oleh wawasan keagamaan yang menyatakan bahwa Islam merupakan nilai ajaran yang memberikan dasar bagi semua aspek kehidupan dan karenanya harus

¹⁹ Ibid.

²⁰ William Shepard, "The Diversity of Islamic Thought: Towards a Typology", dalam Suha Taji-Farouki and Basheer M. Nafi, *Islamic Thought In The Twentieth Century*, 74.

Modernisme Islam yang ditampilkan Muhammadiyah oleh Nakamura dilukiskan sebagai berikut: "Muhammadiyah adalah gerakan yang menampilkan banyak wajah. Dari jauh nampak doktriner. Namun dilihat dari dekat, kita menyadari ada sedikit sistematisasi teologis. Apa yang ada di sana agaknya merupakan suatu susunan ajaran moral yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadits. Nampak eksklusif bila dipandang dari luar, tetapi sesungguhnya tampak terbuka bila berada di dalamnya. Secara organisatoris nampak membebani, akan tetapi sebenarnya Muhammadiyah merupakan suatu kumpulan individu yang menghargai menghargai pengabdian pribadi. Nampak sebagai organisasi yang sangat disiplin, akan tetapi sebenarnya tidak ada alat pendisiplinan yang efektif selain kesadaran masing-masing. Nampak agresif dan fanatik, akan tetapi sesungguhnya cara penyiarannya perlahan-lahan dan toleran. Dan akhirnya tetapi barangkali yang paling penting, nampak anti Jawa, akan tetapi sebenarnya dalam

²¹ Achmad Jainuri, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, 101-102.

Ideologi reformis- modernisme memandang Islam ada ranah *qat'i* dan *zann*. Aspek ajaran Islam memerlukan interpretasi ulang dalam menghadapi tantangan zaman dan menjawab persoalan kontemporer namun tetap berada dalam fondasi Islam. Kaum reformis-modernis yakin pada kesempurnaan ajaran Islam, tetapi pelaksanaannya dalam kehidupan sangat fleksibel. Keberhasilan dalam menyesuaikan diri pada situasi membuat organisasi semakin berkembang yang dibuktikan bertambahnya jumlah keanggotaan, lembaga pendidikan serta serta amal usaha yang dimilikinya. Kaum Modernis muslim berkeyakinan bahwa dari manapun asalnya ide atau gagasan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam adalah diperbolehkan.

Pandangan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan sudah muncul sejak awal dari pendirian Muhammadiyah. “Berkemajuan” telah diperkenalkan oleh founding fathers Muhammadiyah. “Memajoe kan hal Agama kepada anggauta-anggautanja” bunyi pernyataan dalam statue pertama kali tahun 1912, dan dalam edisi awal Suara Muhammadiyah yang di tulis dalam bahasa Jawa diungkapkan “Karena menurut tuntunan agama kita Islam, serta sesuai dengan kemauan zaman kemajuan”.

[illegible]

Semangat kemajuan Muhammadiyah adalah karena di dalam Islam, orang

²³ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Abad Kedua* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika: 2011), 52.

selalu menyemaikan benih- benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia.²⁴

Muhammadiyah harus mampu mendiseminasikan kesadaran kritis ke khalayak luas, kesadaran yang menganggap bahwa realitas atau kondisi sosial sekarang ini bukanlah sesuatu yang *at- given*, kesadaran yang menganggap “Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya”. Muhammadiyah haruslah menjadi organisasi masyarakat yang bisa mendifusikan budaya dialog. Budaya dialog harus dikembangkan di kalangan internal Muhammadiyah dan harus menjadi tauladan yang selalu mengutamakan dialog sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang memiliki peluang untuk melakukan tindakan-tindakan besar bagi Islam, Indonesia dan seluruh umat manusia.

Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kerahmatan kehidupan umat manusia. Dengan pandangan Islam yang berkembang dan menyebarkan pencerahan, maka Muhammadiyah telah melakukan peneguhan tentang ajaran akidah, ibadah dan akhlak serta melakukan pembaharuan dalam mu'amalah duniawiyah yang membawa ajaran Islam yang *rohmatan lil'alamīn*.

²⁴ Dartim Ibnu Rushd, *Pemikiran Pendidikan Hamka dan Kaderisasi Muhammadiyah: Analisis Filosofis dan Konsep* (Surakarta: Sun House Digital, 2016), 134.

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam *multifaced*, tampak doktriner, namun sistematisasi teologisnya menekankan pada aspek moral-etik dari al-Quran dan Sunnah. Ketelitian dalam mengkaji ayat-ayat Al Quran melahirkan amalan konkret Muhammadiyah. Muhammadiyah berasaskan Islam serta bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Gerakan utamanya adalah melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid*, dengan tujuan menjunjung tinggi Agama Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Rumusan ini merupakan formulasi dari esensi dan eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat *tajrid* dan *tajdid* yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah yang *shahih*, dengan mengembangkan pintu ijtihad untuk kemajuan umat dan

Pemikiran tajdid yang diusung Muhammadiyah memiliki dasar teologis dan filosofis yang kokoh. Untuk merealisasikan tajdid ini, perlu adanya kerja cerdas yang dalam terminologi Muhammadiyah disebut Ijtihad yang berarti mencurahkan segala kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang aqidah, hukum, filsafat, tasawuf dan disiplin ilmu lainnya berdasarkan pendekatan tertentu. Sifat universal ajaran Islam menuntut adanya ijtihad agar sesuai dengan perkembangan zaman. Muhammadiyah dihadapkan pada tantangan baru dalam kehidupan umat, bangsa dan dunia kehidupan yang sarat tantangan, sehingga Muhammadiyah tidak cukup hanya mengandalkan usaha-usaha pragmatis atau berjalan mengikuti hukum dinamika alamiah saja tanpa berpijak pada prinsip-prinsip gerakan yang bersifat ideologis.

[illegible]

Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan modern Islam yang tampil lebih moderat. Muhammadiyah sebagai *Islamic Modernism* yang gerakannya lebih fokus untuk membangun *Islamic Society*. Muhammadiyah sebagai gerakan modernis-reformis melakukan pembaruan dalam sejumlah bidang kehidupan.. Pengamalan yang bersifat reformis-modernis tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan ritual-ubudiyah, tetapi juga meliputi semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan serta menerima perubahan berkaitan dengan persoalan-persoalan social dan bersikap rasional.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadis. Argumen ini dari Ibnu Taimiyah yang rasionalisasinya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Hal ini juga diperkuat dengan sabda Nabi sebagai berikut : “Bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pimpinan,” dan juga sabda Nabi, “Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada satu malam tanpa pemerintahan.” Kesimpulan dari kedua hadits tersebut bahwa praktek pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai sarana agar manusia lebih berkesempatan mendekatkan diri kepada Allah.³²

³¹ Zaprul Khan, Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam, *Walisongo*, Vol. 22, No. 1, Mei 2014, 105

³² Khalid Ibrahim lindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 46.

Dalam hubungan agama dengan negara, Natsir menjelaskan bahwa umat Islam merupakan pemeluk mayoritas. Untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan, yaitu sekularisme, atau paham agama. Dan Pancasila menurutnya bercorak sekuler yang menganggap Pancasila adalah hasil penggalian dari masyarakat sehingga tidak mau mengakui wahyu sebagai sumbernya.³⁵ Secara umum hubungan agama dan negara di Indonesia digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu hubungan antagonistik dan hubungan akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara agama dan negara, yaitu hubungan dimana negara dan agama saling mengisi dan ada kecenderungan untuk mengurangi konflik.³⁶

³³ M. Umer Chapra, *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan & Perlunya Reformasi*, diterjemahkan oleh Ikhwan A. Basri (Jakarta : Amzah, 2010), 31.

³⁴ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Di Tinjau Dari Pandangan al-Qur'an* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994), 2.

³⁵ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957), 24-26.

³⁶ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta : Prenada Media, 2000), 41.

- a. *Abu al Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī* (974-1058).

Pandangan *al-Māwardī* mengenai hubungan Islam dan negara bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu dalam menjalankan tugas pada umat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (konsensus ulama).³⁷

- b. *Abu al - A'la al-Mawdūdī* (1903-1979).

Pandangan *al-Mawdūdī* mengenai hubungan Islam dan negara dinyatakan oleh *Abu al - A'la al-Mawdūdī* secara lebih lugas menyatakan bahwa Islam dengan al-Qur'an tidak hanya berisi pesan moral, ibadah dan etika saja, akan tetapi di dalamnya juga berisi tuntunan-tuntunan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik termasuk di dalamnya perihal aturan hukum negara dan institusi kenegaraan. Segala macam aturan yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut haruslah direalisasikan dalam dunia nyata dan salah satu caranya adalah dengan mendirikan negara Islam yang berbasiskan hukum Islam secara penuh. Menurutny kita harus menegakkan hukum Ilahi berdampingan dengannya dan menjadikan syari'at sebagai undang-undang negara. Ia menambahkan jika langkah ini (baca: mendirikan negara Islam) tidak dilakukan, maka kita tidak bisa menegakkan agama secara sempurna akan tetapi sebagian saja dari agama, dan jika hal ini terjadi, maka hal ini tidak lain adalah bentuk penolakan atas agama itu sendiri.³⁸

³⁷ Imam al-Māwardī, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Penj. Fadli Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: darul falah, Cet.II, 2006),

³⁸ Abū al-A'la Al-Mawdūdī, *The Islamic Law and Constitution*, Penj. Asep Hikmat, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1990), 186.

Berkenaan dengan hal ini, Syafiq mughni mendeskripsikan tentang masalah negara dan agama, sebagai berikut:

Beberapa teori tentang relasi agama dan negara diatas menunjukkan bahwa Indonesia cenderung berada pada model kedua, yaitu agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya.

[illegible]

Muhammadiyah dan elitnya tidak dapat dipisahkan dari masalah politik

⁴⁴Ahmad Nur Fuad, *Dari Reformis Hingga Transformatif* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 117.

Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan *khittah* (garis perjuangan). Pembuktian pada *khittah* ini terlihat dari: *khittah* Palembang (1956-1959), *khittah* Ponorogo (1969), *khittah* Ujung Pandang (1971), *khittah* Denpasar (2002).⁴⁶ Ketegasan Muhammadiyah untuk tidak berpolitik dari semangat khittah sejak tahun 1956 hingga 2002 terkandung isyarat bahwa Muhammadiyah jauh lebih antipatif dalam menyikapi dunia politik. Karena itu Muhammadiyah menggariskan *khittah*nya agar tetap istiqamah dalam mengembangkan fungsi dakwah dan tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis.

Selama episode sejarah pertengahan ini, corak pemikiran politik Islam di kalangan ulama Muhammadiyah cenderung formalistik ketika atmosfer politik memberikan peluang bagi artikulasi aspirasi politik menjadikan Islam sebagai dasar negara. Namun demikian sejalan dengan perkembangan politik selama awal orde baru, orientasi formalistik menjadi tidak memiliki tempat dalam lanskap perpolitikan nasional. Kondisi ini membawa Muhammadiyah bergeser lebih kepada orientasi kultural dari pada orientasi politik seperti sebelumnya.⁴⁷

⁴⁶ Haedar Nashir, *Khittah Muhammadiyah Tentang Politik* (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2008), 15.

[illegible]

g, melepaskan ikatan dengan partai politik manapun, baik ideolog
ktural.⁴⁸

Meskipun demikian Muhammadiyah menyadari bahwa
lanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kond
ang selalu memberikan tekanan bahkan paksaan tertentu
ammadiyah untuk melahirkan "ikhtiar" atau "tajdid politik". Fal
memperlihatkan bahwa organisasi ke masyarakatan dimasuki ol
lati antara satu organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberag
n memainkan peran politiknya. Dunia politik telah memberikan te
aan tertentu untuk mengambil peran politik. Baik untuk
urutan seperti himbauan untuk tidak memilih partai politik tert

yang selalu memberikan tekanan bahkan paksaan tertentu kepada masyarakat Islam untuk melahirkan "ikhtiar" atau "tajdid politik". Fakta ini memperlihatkan bahwa organisasi ke masyarakatan dimasuki oleh pengaruh politik. Hal ini berarti bahwa organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberagaman dalam memainkan peran politiknya. Dunia politik telah memberikan tekanan tertentu untuk mengambil peran politik. Baik untuk organisasi Islam maupun organisasi non Islam. Hal ini dapat dilihat dari peraturan seperti himbauan untuk tidak memilih partai politik tertentu.

Berikut ini merupakan sikap politik Muhammadiyah dalam politik Indonesia:

Ahmad Nur Fuad, *Dari Reformis Hingga Transformatif*, 123.

Pada tahun 1913-1918 beliau mendirikan 5 Sekolah Dasar. Tahun 1919 mendirikan Hooge School Muhammadiyah yang kemudian pada tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah. Pada tahun 1923 sekolah ini dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Pada tahun 1930 namanya diganti menjadi Muallimin dan Muallimat. Selanjutnya Muhammadiyah mendirikan organisasi untuk kaum perempuan yang diberi nama Aisyiyah. Organisasi ini dipimpin oleh istri KH Ahmad Dahlan, Ny. Walidah KH Ahmad Dahlan.. Aisyiyah bermula dari badan otonom Sapatresna, kelompok pengajian wanita yang didirikan pada tahun 1914. Nama Aisyiyah digunakan sejak tahun 1920.

[illegible]

b. Era Jepang

c. Era Kemerdekaan

⁴⁹ Nilwani, Kiprah Muhammadiyah Dalam Kancan Politik Nasional, *Tarbawi Khatulistiwa* Vol.2 No. 2, 2016, 36.

[illegible]

d. Pasca Kemerdekaan

e. Era Orde Baru

⁵¹ Ibid., 38.

⁵² Ibid., 38.

menempatkan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun. Namun kemudian terjadi kudeta terhadap kepemimpinan partai oleh H.J. Naro yang didukung oleh rezim Orde Baru.⁵³ Kegagalan politik yang dialami Muhammadiyah dalam menangani Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi pertimbangan Muhammadiyah untuk meninjau kembali hubungannya dengan partai politik. Awal 1970-an menjadi titik balik Muhammadiyah untuk menjaga jarak dengan partai politik apapun.

Menurut Haedar Nashir, tidak sedikit kalangan internal Muhammadiyah berusaha untuk melibatkan organisasi Islam ini dalam kepentingan politik tertentu. Tumbuh argumentasi yang tampak sekilas meyakinkan, bahwa jika Muhammadiyah pasif apalagi apatis terhadap politik maka tidak akan mendapatkan apa-apa baik berupa keuntungan politik maupun lainnya. Begitupun

Perkembangan politik di kalangan Muhammadiyah ditandai oleh kehadiran M. Amien Rais di panggung politik nasional dengan mendirikan partai politik yang bersifat inklusif, yaitu Partai Amanat Nasional. Dalam perjalanan tokoh Muhammadiyah kehadiran Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan M. Amien Rais sesungguhnya merupakan kelanjutan dari semangat gerakan reformasi yang dipelopornya bersama mahasiswa dan komponen bangsa lainnya sejak dirinya menggagas isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang tanwir Muhammadiyah di Surabaya pada 1993 yang diikuti oleh langkah-langkah politik yang kontroversial sepanjang lima tahun sesudahnya.

⁵⁸ Ibid., 43-44.

Melalui reputasi Amien Rais yang merupakan tokoh elit Muhammadiyah memberi efek positif bagi perkembangan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini dengan mudah berdiri di berbagai daerah atas dukungan warga Muhammadiyah. Hampir sebagian besar elit dan warga Muhammadiyah diberbagai tingkatan aktif sebagai inisiator dan kemudian banyak di antaranya yang aktif sebagai pengurus dan pimpinan PAN, selain hanya menjadi pendukung dan simpatisan. Sejak kelahiran PAN itulah tumbuh dinamika politik baru dalam Muhammadiyah yang menumbuhkan persaingan politik di kalangan intern Muhammadiyah.

Yang dimaksud netral adalah Sikap tegas Muhammadiyah dalam hubungannya ketika mengambil kebijakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan segenap kekuatan politik

[illegible]

manapun dalam azas netralitas. Muhammadiyah ingin memerankan posisi politiknya tidak lebih pada konsep yang disebut dengan politik nilai yang murni yaitu Muhammadiyah menebarkan politik yang berpihak kepada kebenaran Islam dengan melakukan aktifitas politik hanya untuk mempraksiskan nilai-nilai Islam sehingga bisa menjadi contoh bagi elit Politik lainnya di Indonesia. Konteks politik praktis Muhammadiyah benar-benar tidak menjadi poros utama, sehingga yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam konteks politik adalah pengedepanan moral politik dalam upaya menyelaraskan fungsi utama Muhammadiyah sebagai Ormas Islam yang berusaha untuk memposisikan dirinya pada posisi yang seharusnya.

1. Kedewasaan sikap politik pada umumnya elit dan warga Muhammadiyah untuk tetap memelihara keutuhan dan kepentingan Muhammadiyah di atas kepentingan pribadi dan kelompok politik.
2. Kebijakan Muhammadiyah secara organisasi yang tetap menjaga jarak dan sikap netral dari kekuatan politik manapun sebagaimana ditunjukkan oleh edaran PP Muhammadiyah.
3. Munculnya kekuatan moderat di kalangan Muhammadiyah sendiri dari elit dan warga yang tidak terlibat langsung dalam partai politik sehingga menjadi salah satu faktor peredam dari berbagai konflik kepentingan politik.⁶⁰

Berdasarkan pola hubungan Muhammadiyah dengan politik di atas, terlihat fakta yang menunjukkan bahwa budaya politik Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam semangat Khittah 1971 dan termanifestasi dalam alam pikiran para elit dan warganya relatif stabil dan konsisten dalam pola yang moderat.

Kelahiran PAN kendati memperoleh dukungan luas sehingga terkesan berhimpitan langsung dengan Muhammadiyah, ternyata tidak serta merta mengubah budaya politik moderat Muhammadiyah dalam menyikapi keadaan yang kritis sekalipun. Secara normatif dan aturan resmi organisasi, Muhammadiyah masih mampu menjaga jarak dengan partai politik. Sikap netral ini tergambar melalui surat PP Muhammadiyah yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia yang menyerukan agar menjaga kemurnian dan keutuhan organisasi.

Dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah telah membuktikan betapa politik menjadi rangkaian yang terhindarkan dalam segenap ruang gerak Muhammadiyah baik intern maupun ekstern yang berhubungan dengan perjuangan bangsa hingga saat ini. Ketiga pola hubungan dalam dinamika politik diatas dilakukan secara silih berganti oleh Muhammadiyah, namun harus berdasar pada Khittah Politik Muhammadiyah yang menjadi landasan utama untuk menjalankan fungsi politik. Khittah tersebut menjadi penegas garis politik Muhammadiyah sampai saat ini dan harus menjadi komitmen bagi seluruh warga Muhammadiyah yang ingin terjun ke dunia politik secara praktis.

Pemaparan yang dikemukakan diatas secara implisit dapat dianalisa bahwa perdebatan klasik sering terjadi dalam sejarah peradaban manusia yang tidak hanya berupa perbedaan wacana, tetapi juga telah berubah menjadi isu keagamaan. Pangkal masalahnya pada ketidaksesuaian persepsi dalam memandang hubungan negara dan agama. Agama dan negara adalah dua institusi yang sama-sama berpengaruh kuat terhadap kehidupan umat manusia.

Secara garis besar ada tiga paradigma pemikiran mengenai relasi agama dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, yang menyatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Kedua, paradigma formalistik, yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara atau sistem politik. Ketiga, paradigma substansialistik, yang menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata.

Relasi antara negara dan agama memiliki beberapa kecenderungan. Pertama, negara berdasar agama. Negara dan pemegang otoritas negara dijalankan berdasarkan agama tertentu dan terjadi bersatunya pemegang otoritas negara dan agama. Pada bentuk negara ini terdapat dua kemungkinan, yaitu warga negara diwajibkan memeluk agama resmi negara dan kemungkinan lainnya warga diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Kedua, agama sebagai spirit bernegara. Negara ini tidak secara formal menganut agama tertentu, namun nilai-nilai agama menjadi spirit penyelenggara dan penyelenggaraan

Dari beberapa teori tentang relasi agama dan negara diatas, Indonesia cenderung berada pada model kedua, yaitu agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya. Model relasi ini, memberikan landasan bagi Muhammadiyah untuk berkomitmen mempunyai wawasan kebangsaan sehingga Muhammadiyah selalu berkontribusi untuk kemajuan negara Indonesia.

Ketegasan Muhammadiyah untuk tidak berpolitik dari semangat khittah sejak tahun 1956 hingga 2002 terkandung isyarat bahwa Muhammadiyah jauh

lebih antipatif dalam menyikapi dunia politik. Muhammadiyah menggariskan *khittah*nya agar tetap istiqomah dalam mengembangkan fungsi dakwah dan tajdidnya sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis.

Pandangan politik kenegaraan yang diadopsi oleh sebagian ulama Muhammadiyah tampak merefleksikan tendensi formalisme meskipun tidak diartikulasikan secara sistematis. Pada perkembangannya mengalami transformasi kepada pandangan yang cenderung substansialis. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, Muhammadiyah menerapkan tiga pola hubungannya dengan politik, yang meliputi hubungan formal atau langsung, hubungan personal atau tidak langsung dan hubungan netral. Ketiga pola hubungan dalam dinamika politik diatas dilakukan secara silih berganti oleh Muhammadiyah, namun harus berdasar pada Khittah Politik Muhammadiyah yang menjadi landasan utama untuk menjalankan fungsi politik.

Dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah telah membuktikan betapa politik menjadi rangkaian yang terhindarkan dalam segenap ruang gerak Muhammadiyah baik intern maupun ekstern yang berhubungan dengan perjuangan bangsa hingga saat ini. Secara umum kondisi internal dalam tubuh organisasi ini dapat terkendali sehingga tidak mengarah pada fragmentasi dan disintegrasi politik yang membahayakan keutuhan Muhammadiyah. Khittah Muhammadiyah menjadi penegas garis politik Muhammadiyah sampai saat ini dan harus menjadi komitmen bagi seluruh warga Muhammadiyah.

Bernegara

dalam Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah,⁶² meliputi:

- a. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
- b. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sungguh-sungguh yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan

⁶¹ Asyuni Abdurrahman, dkk, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), vii.

⁶² Ibid., 87-89.

- f. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

B. Arti dan Dinamika Wawasan Kebangsaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa wawasan berasal dari kata “mawas” yang berarti memandang, meneliti, meninjau, mengamati. Wawasan juga diartikan sebagai pandangan atau tujuan. Sedangkan kebangsaan adalah identitas atau ciri-ciri yang menandai asal bangsanya, atau golongan suatu bangsa.⁶³ Dengan demikian wawasan kebangsaan diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan juga menentukan suatu bangsa, menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas

⁶³Badudu & Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), 122.

Dalam perkembangannya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Menurut Roeslan Abdulgani, wawasan kebangsaan Indonesia lahir sebagai reaksi atas kolonialisme Belanda yang sangat mendominasi di bidang politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya. Dalam aspek politik, wawasan kebangsaan Indonesia lahir dalam rangka menumbangkan dominasi politik Belanda dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Dilihat dari aspek kultural, wawasan kebangsaan mencoba menghidupkan kembali kepribadian bangsa diselaraskan dengan perubahan zaman. Dalam aspek sosial ekonomi, menekankan pada penghentian eksploitasi ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda yang pada gilirannya akan membangun masyarakat baru yang bebas dari kesengsaraan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari konteks nasionalisme Indonesia.⁶⁵

⁶⁵ Roeslan Abdulgani, Pidato di depan sidang konstituante pada 3 Desember 1957.

Berdasarkan catatan sejarah, maka tak layak jika mengobankan keutuhan NKRI di tengah ancaman ideologi dan konflik serta bahaya disintegrasi dari dalam maupun ancaman neo-imperialisme dan neoliberalisme dari negara-negara maju. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa dan kekuatan civil society dituntut untuk meningkatkan komitmen kebangsaannya. Bangsa Indonesia harus memiliki integritas dan kredibilitas yang kuat dalam memainkan perannya di dunia internasional sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan demikian, wawasan kebangsaan menjadi penting untuk komitmen setiap warga negara Indonesia dan harus benar- benar terealisasi dalam kehidupan nyata sehari-hari.

⁶⁶ Asep Purnama Bahtiar, *Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good Governance*, *Tajdid*, Vol. 15, No.2 (Desember, 2017), 56-57.

⁶⁷ Adi Sage Lazuardi, *Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam* (Jakarta: Citra Media, 1996), 17.

⁶⁷ Adi Sage Lazuardi, *Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam* (Jakarta: Citra Media, 1996), 17.

Imperium Romawi secara bertahap runtuh, kemudian berdirilah berbagai kerajaan baru dengan rakyat yang relative lebih homogen serta punya kesadaran dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Meskipun terdapat pluralisme dalam bidang politik, namun bangsa-bangsa baru dan Negara-negara nasional di Eropa mempunyai persamaan warisan kultural yang memudahkan proses integrasi bangsa.

Wawasan kebangsaan bukanlah suatu konsep politik yang pertama kali lahir di Indonesia. Kesadaran wawasan kebangsaan ini lahir dari persepsi pemimpin pergerakan kemerdekaan yang telah berpendidikan Barat dalam perjuangan menentang penjajahan Belanda. Sumbangan dari *local genius* bangsa Indonesia terletak pada kemampuan bangsa untuk mengadopsi serta mengadaptasi berbagai konsep yang datang dari luar dan menjadikannya sebagai bagian integral dari sistem nilai masyarakat sendiri.

Wawasan Kebangsaan lahir sebagai kekuatan yang berhadapan dengan ideologi kolonial, di mana tujuannya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Wawasan kebangsaan di Indonesia memang baru dikenal setelah terjadi kontak di antara kaum terpelajar Indonesia dengan peradaban Eropa dan Amerika. Ide wawasan kebangsaan lahir di kalangan kaum intelektual yang kemudian ide ini disebarluaskan ke kalangan masyarakat dalam rangka menghadapi kekuatan asing yang berbeda dari segi ras dan agamanya. Agama Islam telah menyatukan berbagai kelompok etnis dan kultural ke dalam pandangan keagamaan, sistem hukum dan institusi sosial yang relatif sama.

Perkembangan wawasan kebangsaan dapat diklasifikasi sesuai dengan perjalanan sejarahnya menjadi dua fase perkembangan berikut ini:

Pada tanggal 20 Mei 1908 bangsa Indonesia memperingatinya sebagai hari Kebangkitan Nasional, karena Boedi Oetomo dapat dipandang sebagai pelopor Kebangkitan Nasional. Selama rentang waktu 20 tahun lahir organisasi-organisasi politik sebagai alat baru untuk merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Sebelumnya, selama 3 abad perlawanan terhadap Belanda dilakukan secara sporadik, terpisah dengan organisasi perang tradisional yang mengandalkan kekuatan fisik. Pada era kebangkitan ini, para pemimpin politik

[illegible]

Pada tahun 1911 lahir Indische Partij yang merupakan partai penganut wawasan supra etnik. Perkembangan wawasan kebangsaan berikutnya adalah manifesto politik oleh organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda. Manifesto politik tahun 1924 merupakan suatu penegasan dari tujuan politik Perhimpunan Indonesia (PI) yakni kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia akan diperoleh apabila ada aksi massa yang dilakukan serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan rakyat berdasar atas kekuatan sendiri.⁶⁹

⁷⁰ Harry A. poeze, (*Pergulatan Menuju Republik ; Tan Malaka 1925-1945*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999) 4.

⁷⁰ Harry A. poeze, (*Pergulatan Menuju Republik ; Tan Malaka 1925-1945*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999) 4.

Pada fase ini terjadi tindakan represif yang keras dari Pemerintah Kolonial Belanda menyebabkan gerakan nasionalis mengalami kemunduran hebat. Dalam fase ini wawasan kebangsaan digunakan secara luas dalam rangka perjuangan melawan Belanda. Meskipun dalam bidang politik mengalami kemunduran, namun wawasan kebangsaan tetap dikembangkan melalui bidang kebudayaan dengan munculnya pemikiran tentang kebijakan dan strategi dasar untuk membangun Indonesia di masa depan.

Bentuk negara “kesatuan” menjadi alat pererat dalam konsep wawasan kebangsaan. Mengenai bentuk negara, seluruh elemen bangsa yakin dengan pilihan mereka tentang bentuk negara kesatuan yang merupakan pilihan para *founding father* Republik Indonesia dan telah mendapat dukungan kuat oleh

72

[illegible]

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah menga
 italisasi visi dan karakter bangsa, serta mendorong gerakan mencerd

KRH. Hadjid yang merupakan salah satu murid KH Ahmad
h menulis 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Alquran yang
tok wejangan dan pelajaran pendiri Persyarikatan Muhammadiyah
rid-murid dan pengikutnya. Tujuh falsafah ajaran dan tujuh belas k
t Alquran tersebut merupakan landasan bagi para pewaris Muham
g telah mematrikan jiwa/ruh Muhammadiyah dalam k
masyarakat dan berbangsa.⁷³

Tujuh falsafah ajaran tersebut yaitu: 1) manusia hidup di dunia ini untuk bertaruh; sesudah mati, akan mendapatkan kebahagiaan atau sengsaraan; 2) Kebanyakan di antara manusia berwatak angkuh dan sombong; mereka mengambil keputusan sendiri; 3) Manusia kalau mengerjakan perbuatan baik, sekalipun hanya sekali, dua kali, berulang-ulang, kemudian menjadi biasa. Kalau manusia itu menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu suka

Sedangkan 17 kelompok ayat Alquran yang menjadi pokok wejangan dan pelajaran dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 1) Membersihkan diri sendiri, surat Al-Jathiyah ayat 23; 2) Menggempur hawa nafsu mencintai harta benda, surat al-Fajr ayat 17-23; (3) Orang yang mendustakan agama, surat al-Ma'un ayat 1-7; 4) Apakah artinya agama itu, surat al- Rum ayat 30; 5) Islam dan sosialisme, surat al-Taubah ayat 34-35; 6) Surat al- 'Ashr ayat 1-3; 7) Iman/ kepercayaan, surat al-'Ankabut ayat 1-3; 8) Amal sholeh, surat al-Kahf ayat 110 dan surat al-Zumar ayat 2; 9) *Wa tawāṣaw bil haqq*, surat Yunus ayat 108, surat al-Kahf ayat 29, surat Muhammad ayat 3,

[illegible]

Semangat kemanusiaan berlandaskan cinta kasih telah mempersatukan orang-orang yang berbeda bangsa dan agama dalam Muhammadiyah. Gerakan sosial Muhammadiyah didasarkan atas pandangan bahwa kebenaran (*al-haq*) dan kebaikan (*al-khair*) Islam adalah manfaatnya tanpa memandang batas bangsa dan agama. “Alquran Suci” dipahami dengan “Akal Suci” dan “Hati Suci” serta diamalkan dengan welas asih sebagai etos kemajuan peradaban, keselamatan dunia dan kemanusiaan.⁸²

⁸¹ Noor Chozin Agham, *Filsafat Pendidikan Muhammadiyah* (Jakarta: UHAMKA Press, 2012), 40-41. Lihat juga: Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), 55.

⁸² Lihat: Praeadvies dari Hoofdbestuur Perserikatan Moehammadiyah di Yogyakarta pada “Kongres Islam Besar Cirebon dan Kesatuan Hidup Manusia”, terbit pada 1922 dan 1924 dalam Robert W. Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan, *Api Pembaharuan Kiai KH Ahmad Dahlan* (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), 107.

⁸² Lihat: Praeadvies dari Hoofdbestuur Perserikatan Moehammadiyah di Yogyakarta pada “Kongres Islam Besar Cirebon dan Kesatuan Hidup Manusia”, terbit pada 1922 dan 1924 dalam Robert W. Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan, *Api Pembaharuan Kiai KH Ahmad Dahlan* (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), 107.

“Lagi pula, boleh dikatakan akan timbangan atau perlawanan pengajaran Darwin. Bukankah pengajaran Darwin itu berasaskan kepuasan hidup? Sudah tentu saja kejadiannya pengajaran ini menindas dan memusnahkan yang bersifat lembek. Karena bermaksud untuk diri sendiri, supaya dalam dunia ini mendapat tempat yang baik. Sedang pikiran baru itu timbul dari asas lain, yakni asas cinta kasih. Asas cinta kasih ini sudah barang tentu tiada mengizinkan, tiada memberi kesempatan, beberapa untuk keperluan diri sendiri. Akan tetapi, mewajibkan berkorban untuk mencapai hidup mulia bagi umum. Dan kalau begitu, apakah yang disebut cinta-kasih pada orang tua, pada istri dan anak atau lainnya? Tiada lain hanyalah mengorbankan diri untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Begitu juga perserikatan kami ini termasuk pikiran cinta-kasih, yang akan kita curahkan kepada sesama manusia, supaya dengan cinta kasih dan berkorban dapatlah tercapai hidup mulia. Besok pagi kita buka poliklinik ini. Siapa juga, baik orang Eropa, baik orang Jawa (orang pribumi), baik Cina atau bangsa Arab, boleh datang kemari, akan ditolong cuma-cuma, asalkan betul miskin.”⁸⁶

⁸⁶ Abdul Munir Mulkan, *Kiai KH Ahmad Dahlan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*, 82.

⁸⁷ Zakiyuddin Baidhawry, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al Qur’an”, 23-24.

[illegible]

n dan tidak mau beranjak ke surat berikutnya, meskipun murid
h mulai bosan. Dikarenakan perasaan bosan itu, KH. Syu
upakan salah seorang muridnya, pun mempertanyakan mengapa K
lan tidak mau beranjak untuk mempelajari surat selanjutnya. L
ad Dahlan balik mempertanyakan kepada KH Syuja' apakah beli
r memahami surat yang telah diajarkan. KH. Syuja' menjawab bah
n-temannya sudah betul-betul paham arti surat al Ma'un tersebut d
menghafalnya di luar kepala. Namun KH Ahmad Da
pertanyakan lagi apakah KH Syuja' sudah mengamalkannya, dan
jawab "bukankah kami membaca surat ini berulang kali dalam shal
KH Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa maksud mengamalka

n dan tidak mau beranjak ke surat berikutnya, meskipun murid
h mulai bosan. Dikarenakan perasaan bosan itu, KH. Syu
upakan salah seorang muridnya, pun mempertanyakan mengapa K
lan tidak mau beranjak untuk mempelajari surat selanjutnya. L
ad Dahlan balik mempertanyakan kepada KH Syuja' apakah beli
r memahami surat yang telah diajarkan. KH. Syuja' menjawab bah
n-temannya sudah betul-betul paham arti surat al Ma'un tersebut d
menghafalnya di luar kepala. Namun KH Ahmad Da
pertanyakan lagi apakah KH Syuja' sudah mengamalkannya, dan
jawab "bukankah kami membaca surat ini berulang kali dalam shal
KH Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa maksud mengamalka

n dan tidak mau beranjak ke surat berikutnya, meskipun murid
h mulai bosan. Dikarenakan perasaan bosan itu, KH. Syu
upakan salah seorang muridnya, pun mempertanyakan mengapa K
lan tidak mau beranjak untuk mempelajari surat selanjutnya. L
ad Dahlan balik mempertanyakan kepada KH Syuja' apakah beli
r memahami surat yang telah diajarkan. KH. Syuja' menjawab bah
n-temannya sudah betul-betul paham arti surat al Ma'un tersebut d
menghafalnya di luar kepala. Namun KH Ahmad Da
pertanyakan lagi apakah KH Syuja' sudah mengamalkannya, dan
jawab "bukankah kami membaca surat ini berulang kali dalam shal
KH Ahmad Dahlan menjelaskan bahwa maksud mengamalka

Tafsir KH Ahmad Dahlan terhadap surat al-Ma'un itu mendasari gerakan amalnya yang diperuntukkan kepada kaum dhuafa' (proletar, tertindas).⁹² Etos al-Ma'un menjadi referensi aksi pemberdayaan kaum proletar seperti aksi pemberdayaan perempuan di ruang publik.⁹³ Etos ini berujung pada spirit peradaban. Ini dapat disaksikan dari semua karya dan amal usaha Muhammadiyah. Berdirinya rumah sakit PKU Muhammadiyah di seluruh Nusantara, diawali dari sebuah poliklinik yang dipimpin oleh dr. Somowidagdo

⁹³ Robert W Hefner, Sukidi Mulyadi, Abdul Munir Mulkhan, *Api Pembaruan Kiai KH Ahmad Dahlan* (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), 110.

Menurut Ahmad Norma Permata, etos al-Ma'un mengajarkan bahwa kepedulian sosial merupakan kriteria sekaligus komponen dari kesalihan spiritual. Dalam bahasa kontemporer, perspektif ini diidentikkan dengan ideologi kiri, yang berarti pemahaman strukturalis terhadap ketimpangan sosial yang dilawankan dengan kesetaraan hak individual. Dalam perspektif al-Ma'un, evaluasi moral terhadap ketimpangan sosial menyatakan bahwa peradaban selalu dikuasai kelompok kuat yang meliputi penguasa, *high class*, cendekiawan pandai, dan golongan kuat lainnya. Karena itulah moralitas al-Maun selalu berpihak

[illegible]

Logika al-Ma'un berkonsekuensi pada strategi membangun kehidupan (peradaban) yang ideal dan berkeadilan. Wawasan al-Ma'un sangat dekat dengan filsafat idealis yang melihat ukuran kebaikan berakar pada sistem yang sedang berjalan. Realitas kehidupan yang baik dihasilkan dari sistem yang baik, begitupun juga sistem yang buruk akan menghasilkan realitas kehidupan yang

⁹⁶ Zakiyuddin Baidhawiy, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al Qur’an”, 38.

Hal ini senada dengan apa yang ditulis oleh Samuel P. Huntington bahwa hakikat peradaban adalah sejarah manusia, dan sejarah manusia adalah sejarah peradaban itu sendiri.¹³⁴ Hamka dalam Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa Allah menjelaskan martabat umat manusia terdiri dari empat unsur, yang meliputi iman, amal shaleh, taushiah kebenaran dan taushiah kesabaran. Jika empat syarat itu tidak dapat terpenuhi maka rugilah seluruh masa hidup.¹⁰⁰

⁹⁸ Ibid., 39.

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 28-29-30* (Jakarta: Pustaka Panijimas, 1985), 256.

102 Menurut informasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purworejo, KH Djazuli berasal dari Grabag Purworejo, terakhir tinggal di Sangubanyu Kutoarjo. Beliau pendiri Poliklinik Muhammadiyah Grabag. Salah seorang juru rawatnya ada yang bernama Sarbini yang kemudian menjadi anggota TNI, pernah menjadi Panglima Divisi Diponegoro serta pernah menjadi Menteri Veteran RI di masa Orde Baru. Letjen Sarbini merupakan salah satu inisiator berdirinya Universitas Islam Sultan Agung. Namanya diabadikan menjadi nama Gedung Sarbini di Jakarta.

Maksud KH Ahmad Dahlan menggunakan metode pengulangan dalam mengajarkan surat al-‘Ashr adalah agar kandungan dari surat tersebut terimplementasi kepada murid-muridnya dengan terbiasa memiliki etos disiplin tepat waktu dan selalu mengisi waktu dengan perbuatan yang bermanfaat (amal saleh). Dalam surat al-‘Ashr terkandung konsep kunci yang menjadi spirit pembangunan peradaban. Ayat-ayat dalam al-‘Ashr berbentuk jamak dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup individu maupun masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid.

Etos al-‘Ashr memberikan pelajaran bahwa gerakan Muhammadiyah

Di masa kelahiran Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan menggambarkan

¹⁰⁶ Ibid.

[illegible]

Salah satu implementasi dari ketauhidan adalah etika amal shaleh dimana kemuliaan dan keberhasilan moral manusia dapat dilihat dari bagaimana manusia mengisi ruang dan waktu serta untuk memberi manfaat lingkungan sosialnya. Implementasi tauhid dalam pembangunan peradaban ditafsirkan sebagai jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan kesemestaan. Iman atau tauhid tidaklah sempurna tanpa amal shalih. KRH. Hadjid menjelaskan dalam karyanya Tujuh Belas Kelompok Ayat bahwa amal salih adalah amal yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi ahli keluarganya, bagi kaum kerabatnya, serta bagi semua manusia.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Zakiyuddin Baidhawiy, “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al Qur’an”, 33.

¹⁰⁶ KRH. Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran*, 86.

Dalam konsep Muhammadiyah, amal shalih bukan semata-mata ritual ibadah mahdhah, tetapi merupakan kerja peradaban yang bermanfaat bagi semesta. Amal shaleh adalah amal yang kreatif dan solutif untuk peradaban. Karena itu supaya amal produktif dan efisien, maka perlu pelembagaan amal shaleh dalam organisasi, bukan hanya dalam individu. Amal shaleh merupakan pembuktian dari iman. KRH. Hadjid mengutip firman Allah yang artinya, “sekali-kali tidak akan (sempurna) suatu kebajikan, sehingga kamu menginfakkan sebagian harta yang sangat kamu cintai”, memberikan barang yang sangat dicintai dan mendahulukan saudara lainnya dengan mengalahkan dirinya adalah akhlak orang yang berbuat kebajikan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Achmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah: Perspektif Sejarah* (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah: 2010), 25.

¹⁰⁸ KRH. Hadjid, *Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran*, 163.

- ...a, Muhammadiyah bagian
...itan wanita Indonesia untuk

o yang pada saat itu menjadi presiden Indonesia

Banyak fakta historis yang membuktikan bahwa Muhammadiyah memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Saad Ibrahim menambahkan,

Lebih lanjut Saad Ibrahim menambahkan tentang pembicaraan kebangsaan ini selalu terjadi di Muhammadiyah. Menurutnya, “Prof Haidar Nasir dalam pengukuhan guru besarnya mengangkat tema besar “Moderasi Indonesia dan Ke-Indonesiaan”. Ini menjadi bagian dari kelanjutan gagasan-gagasan besar KH Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah mengenai kontribusi Muhammadiyah dalam hal pikiran-pikiran besarnya sampai diformulasikan dalam berbagai aksi kegiatan yang berimbas langsung terhadap masyarakat Indonesia.”¹¹²

¹¹¹ Saad Ibrahim, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2019.
¹¹² Ibid.

Selain itu, tokoh Muhammadiyah dari Jawa Tengah, KH Abu Dardiri mengajukan gagasan tentang keberadaan Kementerian Agama. Menteri Agama pertama ialah HM Rasjidi, dikenal sebagai ilmuwan atau ulama lulusan Universitas Sorbonne, Prancis, yang berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Kahar Muzakkar yang menjadi anggota Panitia Piagam Jakarta telah melakukan upaya

[illegible]

Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang merupakan tokoh utama kemerdekaan dan proklamator itu beristrikan kader Aisyiyah, Fatmawati. Beliau adalah putri Konsul Muhammadiyah Sumatra, Hasan Din. Soekarno mengakui telah lama berguru secara informal kepada KH Ahmad Dahlan. Paham Islam progresif menjadi daya tarik Soekarno untuk bergabung menjadi anggota dan pengurus Muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan bersama Muhammadiyah dan kadernya, tidak hanya berkeinginan memajukan Islam dengan melakukan pembaharuan atau tajdid tetapi juga aktif berperan dalam tugas-tugas kebangsaan. Dalam menghadapi penjajah, Muhammadiyah tidak hanya memberikan sumbangsih pemikiran melainkan juga terjun langsung ke medan peperangan menentang segala bentuk penjajahan.¹¹⁶

Pertama, Kondisi bangsa Indonesia dan umat Islam pada waktu itu menjadi latar belakang dan faktor berdirinya Muhammadiyah. Berawal dari keprihatinan dan keberpihakan KH Ahmad Dahlan bersama para pengikutnya atas

[illegible]

“ Fenomena yang terjadi pada Kehidupan masyarakat khususnya di Kauman Yogyakarta yang memperlihatkan sebuah fakta bahwa kehidupan masyarakat di kauman sangat jauh dengan kemuliaan Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan. Islam yang dipahami KH Ahmad Dahlan adalah Islam yang penuh dengan kemajuan. Tetapi dalam kehidupan di Kauman faktanya berbalik. Disana banyak orang yang miskin, orang tidak berpendidikan yang bagus, dan cukup banyak orang yang sakit.”¹¹⁷

Mengenai hal ini Hidayatullah juga menjelaskan tentang keterlibatan tokoh Muhammadiyah untuk ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, “Muhammadiyah telah mengkhidmatkan bangsa untuk memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan masyarakat

¹¹⁸ Asep Purnama Bahtiar, *Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good Governance*, 58.

Najib Hamid juga menjelaskan tentang kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara sebagai berikut:

Mengenai hal ini, Hidayatullah juga menyampaikan tentang pemikiran Ahmad Dahlan yang berkontribusi pada bangsa dan negara melalui bidang pendidikan sebagai berikut:

¹²¹ Asep Purnama Bahtiar, *Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good Governance*, 58.

¹²² Najib Hamid, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 januari 2020.

¹²³ Hidayatullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Mu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MPMDC) membantu daerah bencana sebagai bentuk gerakan filantropi selama lima tahun terakhir perkembangan program kerja ini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini menunjukkan terobosan amal usaha, program, dan kegiatan gerakan". Model praksis gerakan merupakan sebuah model yang dapat mengembangkan berbagai usaha (amal usaha) yang lebih baik, berkualitas, dan unggul sehingga dapat direplikasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah setempat. Model praksis gerakan dalam bentuk

dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Mu dan Muhammadiyah Disaster Management Center membantu daerah bencana sebagai bentuk gerakan filantropi lima tahun terakhir perkembangan program kerja telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini telah terobosan amal usaha, program, dan kegiatan gerakan“. Model praksis gerakan merupakan sebuah dan mengembangkan berbagai usaha (amal usaha daerah yang lebih baik, berkualitas, dan unggul sehingga dapat direplikasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah setempat. Model praksis gerakan dalam bentuk

dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Mu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MPMDC) membantu daerah bencana sebagai bentuk gerakan filantropi selama lima tahun terakhir perkembangan program kerja ini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini menunjukkan terobosan amal usaha, program, dan kegiatan gerakan". Model praksis gerakan merupakan sebuah model yang dapat mengembangkan berbagai usaha (amal usaha) yang lebih baik, berkualitas, dan unggul sehingga dapat direplikasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah setempat. Model praksis gerakan dalam bentuk

dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Mu dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MPMDC) membantu daerah bencana sebagai bentuk gerakan filantropi selama lima tahun terakhir perkembangan program kerja ini telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini menunjukkan terobosan amal usaha, program, dan kegiatan gerakan". Model praksis gerakan merupakan sebuah model yang dapat mengembangkan berbagai usaha (amal usaha) yang lebih baik, berkualitas, dan unggul serta dapat direplikasi di seluruh lingkungan Muhammadiyah setempat. Model praksis gerakan dalam bentuk

Dengan penerimaan Pancasila pada 18 Agustus 1945 sebagai falsafah dan dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka wilayah ini menjadi wilayah perjanjian, dan NKRI adalah Negara Perjanjian (*Abode of Concensus* atau *Dār al- ‘Ahd*). Negara Perjanjian atau *Dārul ‘Ahdi* adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara segenap rakyat warga negara. Perjanjian ini bersifat politis dikarenakan berhubungan dengan kehidupan bernegara. Namun jika dilakukan oleh orang-orang yang beragama, maka perjanjian itu tentu bersifat keagamaan. Kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh bangsa yang mewakili segenap golongan pada bulan suci Ramadhan itu, dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sakral.¹²⁸

¹²⁷ Din Syamsuddin, *Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Ahdi Was Syahadah)*, disampaikan pada Taushiyah Kebangsaan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (18 Agustus 2011).

[illegible]

Pada tingkat ini, pandangan mereka itu adalah sebuah ijtihad politik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literatur pemikiran politik Islam klasik tidak ditemukan istilah *Dārul Ahdi*. Dalam diskursus ulama politik klasik adalah *Dārul Islam* (kawasan atau negara Islam) atau *Dārus Silmi* (kawasan damai) yang sering dipertentangkan dengan *Dārul Kufri* (kawasan atau Negara Kufur) atau *Dārul Ḥarbi* (kawasan atau negara perang). *Dārul Islam* adalah suatu negara atau kawasan yang menerapkan hukum-hukum Islam, walaupun sebagian penduduknya non Muslim. Sedangkan *Dārul Ḥarbi* adalah wilayah yang tidak dikuasai oleh kaum Muslimin, bahkan di wilayah itu mereka diperangi, maka

¹³⁰ Najib Hamid, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2020.

Kedua konsep ini, khususnya *Dārul Islam* (Negara Islam) dan *Dārul Kufri* (Negara Kufur) acapkali ditransfer oleh sebagian aktifis Muslim untuk diterapkan di negeri Muslim modern, seperti Indonesia. Tindakan seperti ini tentu merupakan ancaman bahkan dikategorikan sebagai makar terhadap Negara Pancasila. Dari perspektif demokrasi, adanya pikiran atau aspirasi apapun adalah sah selama diartikulasikan melalui prosedur dan mekanisme konstitusional. Pendekatan demikian tentu merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian atau kesepakatan. Kesepakatan untuk menerima Negara Pancasila tentu mengikat setiap dan segenap rakyat warga negara. Bagi umat Islam, komitmen terhadap Negara Pancasila dapat dijadikan sebagai sikap keagamaan, yaitu menepati dan memelihara janji dan amanat. Memperlakukan Negara Perjanjian secara sejati dapat dikembangkan dalam sikap bahwa konsensus itu tidak hanya merupakan janji, akan tetapi sebagai janji berat yang harus dipenuhi.¹³²

¹³¹ Din Syamsuddin, *Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Ahdi Was Syahadah)*, disampaikan pada Taushiyah Kebangsaan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (18 Agustus 2011).

132 Ibid.

Selain sebagai Negara Perjanjian atau *Dārul ‘Ahdī*, NKRI juga merupakan Negara Persaksian atau *Dārus Shahādah*. *Shahādah* dalam Bahasa Arab, mengandung arti persaksian atau pembuktian. *Dārus Shahādah* adalah negara di mana warga negara berlomba-lomba menampilkan persaksian atau pembuktian kepada warga negara lain tentang kinerja mereka dalam merealisasi cita-cita bersama membangun negara. Pada Negara Perjanjian setiap warga negara terikat dengan cita-cita bersama yang telah disepakati, maka setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap negara. Pada Negara Persaksian, setiap warga negara atau kelompok warga negara memiliki peluang yang sama untuk berperan serta membangun Negara.¹³⁴

¹³³ Ibid.

[illegible]

Untuk memperkuat komitmen kebangsaannya, Muhammadiyah telah merumuskan satu pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah* pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 yang lalu. Konsep ini menegaskan komitmen keIslaman dan keIndonesiaan yang perlu disebarluaskan secara terus menerus kepada segenap khalayak umum warga negara Indonesia khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah melalui berbagai bidang.¹³⁶ Mengenai hal ini, Hidayatullah juga menambahkan, “Pada Muktamar yang ke 47 di Makassar, Muhammadiyah menformulasikan konsep *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah* sebagai wujud pandangan Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan ini. Harapannya kita bisa melanjutkan garis besar yang digagas oleh muhammadiyah untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerakan keindonesiaan.”¹³⁷

Dalam hubungannya dengan negara dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah akan berusaha untuk senantiasa berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki

136 Ibid.

¹³⁷ Hidayatullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

Sege nap umat Islam termasuk di dalamnya Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *Dār al-Shahādah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju kemajuan di segala bidang. Dalam Negara Pancasila sebagai *Dār al-Shahādah*, umat Islam harus siap bersaing (*fastabiqul khairāt*) untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan sege nap kreasi dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa mempunyai peluang besar untuk mengamalkan etos *fastabiqul khairāt* itu dan tampil menjadi *a leading force* atau kekuatan yang berada di garis depan untuk mengisi dan memimpin Negara Pancasila menuju kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dan berperadaban tinggi.¹⁴²

¹⁴² Din Syamsuddin, *Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan Implementasi*, disampaikan dalam seminar Pra Mukhtar Muhammadiyah ke 48 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (3 Maret 2020).

Syafiq Mughni yang merupakan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ikut menjadi tim untuk merundingkan konsep *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah*. Beliau menjelaskan bahwa, “Gagasan *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah* muncul dari ide Pak Dien Syamsuddin sebagai ketua umum PP Muhammadiyah yang disampaikan pada berbagai pertemuan, salah satunya di Gedung Pertemuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang beralamat di jalan Kaliurang Yogyakarta. Akhirnya Gagasan tersebut disetujui secara aklamasi pada mukatamar yang ke 47 di Makasar.”¹⁴⁴

¹⁴³ Ibid.

[illegible]

dan kesejahteraan;(2)Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah;(3)Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam;(4)Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan;(5)Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah;(6) Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik;(7)Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai ajaran Islam;(8)Kerjasama dengan semua golongan Islam dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya;(9) Membantu Pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya; dan (10) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.¹⁴⁵

Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang tegas dan terus berkomitmen sesuai dengan konsep *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah*. Hal ini senada dengan pemaparan Isna Agustina. Menurutnya, “Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamlirkan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional (*Dārul ‘Ahdi*) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (*Dārul Shahādah*).”¹⁴⁶

¹⁴⁴ Din Syamsuddin, *Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan Implementasi*.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Isna FA, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Januari 2020.

Pertama, sejak Era Reformasi pada 1998, memberi kebebasan politik mendorong perkembangan wacana tentang negara ideal sebagai alternatif terhadap Negara Pancasila yang dinilai “gagal” membawa keadilan dan kesejahteraan. Reformasi merupakan upaya koreksi dalam bentuk perubahan struktural yang cukup fundamental. sebagian umat Islam ada yang melirik tawaran yang dianggap Islami, baik Negara Piagam Jakarta, Negara Syariat, maupun Khilafah. Penegasan tokoh organisasi Islam seperti KH. As’ad Syamsul Arifin dari NU maupun tokoh Muhammadiyah, bahwa Negara Pancasila adalah ideal dan final memang diterima luas, namun pikiran lain selalu asa atau tidak pernah pudar. Realitas obyektif ini sesungguhnya kontra-produktif bagi perjuangan umat Islam, dan menjadi dalih bagi tuduhan stereotipikal bahwa umat Islam anti Pancasila.

¹⁴⁷ Din Syamsuddin, *Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan Implementasi*.

Gejala penyimpangan ini tidak hanya terjadi pada tataran praksis pembangunan, tapi juga pada penjabaran legal-konsepsional dalam bentuk produk hukum dan perundang-undangan. Banyak undang-undang yang justru menyimpang dari Undang-Undang Dasar, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini membuka jalan bagi dominasi asing dalam berbagai sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan perbankan. Sebagai akibatnya, kedaulatan negara dalam bidang ekonomi menjadi runtuh. Hal inilah yang menjadi alasan perlu dilakukannya jihad konstitusi untuk mengoreksi sejumlah Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi. Langkah konstitusional yang ditempuh ini merupakan "jihad konstitusi" yang bertujuan untuk menyelamatkan Negara dan merupakan upaya meluruskan "Kiblat Kebangsaan". Banyak tantangan dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri dalam upaya perjuangan meluruskan "Kiblat

Bagi umat Islam kesepakatan ini memiliki relevansi dan signifikansi dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Sejalan dengan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai Islami (ikut disetujui oleh Syaikh Al-Azhar Dr. Ahmad At-Thayyib), dan Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai Islam (pernyataan Kelompok Islam pada Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, 2018), maka walau Negara Pancasila bukanlah negara Islam, tapi Negara Pancasila dapat disebut sebagai negara Islami.

¹⁵¹ Ibid.

[illegible]

1. Menjauhkan Pancasila dari upaya monopoli kepemilikan dan penafsiran. Upaya kepemilikan dan penafsiran sepihak tidak hanya bertentangan dengan esensi Pancasila itu sendiri sebagai kesepakatan, tetapi juga dapat merubah kesepakatan itu sendiri. Walaupun Pancasila boleh ditafsirkan oleh kelompok atau lembaga tertentu asalkan tidak menyimpang dari tafsir umum, namun tafsir resmi haruslah berasal dari tafsir kolektif dari lembaga kesepakatan. Dalam kaitan ini, Pancasila harus dijauhkan dari praktek instrumentalisme, seperti menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengenyahkan lawan politik untuk menguasai Negara Pancasila padahal dengan cara melanggar nilai-nilai Pancasila.

[illegible]

2. Mendekatkan Pancasila dan Negara Pancasila dengan akar kelahirannya, khususnya agama dan budaya. Jelas Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berpangkal pada agama. Maka agama dan Pancasila adalah setali dua uang, keduanya bersahabat dekat, dan oleh karena itu Pancasila harus didekatkan dengan agama, dan agama harus didekatkan dengan Pancasila. Maka, wacana kebangsaan perlu bercorak dialogis-harmonis, bukan dialektik-antagonistik. Dengan agama Pancasila akan tegak, tanpa agama Negara Pancasila menjadi retak.
3. Sebagai ideologi negara Pancasila perlu diperbuatkan, tidak sekedar diperkatakan. Maka nilai-nilai Pancasila perlu disenyawakan ke dalam proses Pembangunan Nasional dalam berbagai aspeknya. Suatu agenda mendesak adalah sistem nasional, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi, disesuaikan dengan imperatif Sila-Sila Pancasila. Dalam kaitan inilah, Negara Pancasila sebagai *Dārus ‘Shahādah* harus menjelma dan dijemlakan. Rakyat warga negara perlu secara bertanggung jawab memberi kesaksian/pembuktian (*Shahādah*) baik secara individual maupun kolektif. Sebagai *Dārus Shahādah*, Negara Pancasila adalah ajang pembuktian dan perlombaan kebaikan segenap rakyat warga negara. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang diberikannya.

Pemerintah sebagai pemangku amanat tetap menempati posisi penting dalam mewujudkan kemaslahatan bersama sesuai dengan konsep *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah*. Penyelenggara negara dalam *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah* dituntut secara bertanggung jawab mengemban misi dan fungsinya. Dalam perspektif Konstitusi,

omi seluruh rakyat, dengan berada di atas da

ada era modern tentang bentuk negara dan pen

spektif formalisme-substantifisme, atau dari segi c

i dan separasi, yang menampilkan spektra cukup lu

si antara agama dan negara yang banyak dipili

nni yang menekankan adanya simbiosisme aga

siawi memadukan corak simbiosisme dan watak

an dasar negara, konstitusi negara, dan motto

ng merefleksi prinsip Jalan Tengah (*wasathiyah/ th*

embahasan terdahulu telah ditegaskan bahwa wawa

omi seluruh rakyat, dengan berada di atas da

ada era modern tentang bentuk negara dan pen

spektif formalisme-substantifisme, atau dari segi c

i dan separasi, yang menampilkan spektra cukup lu

si antara agama dan negara yang banyak dipili

nni yang menekankan adanya simbiosisme aga

siawi memadukan corak simbiosisme dan watak

an dasar negara, konstitusi negara, dan motto

ng merefleksi prinsip Jalan Tengah (*wasathiyah/ th*

embahasan terdahulu telah ditegaskan bahwa wawa

omi seluruh rakyat, dengan berada di atas da

ada era modern tentang bentuk negara dan pen

spektif formalisme-substantifisme, atau dari segi c

i dan separasi, yang menampilkan spektra cukup lu

si antara agama dan negara yang banyak dipili

nni yang menekankan adanya simbiosisme aga

siawi memadukan corak simbiosisme dan watak

an dasar negara, konstitusi negara, dan motto

ng merefleksi prinsip Jalan Tengah (*wasathiyah/ th*

embahasan terdahulu telah ditegaskan bahwa wawa

omi seluruh rakyat, dengan berada di atas da

ada era modern tentang bentuk negara dan pen

spektif formalisme-substantifisme, atau dari segi c

i dan separasi, yang menampilkan spektra cukup lu

si antara agama dan negara yang banyak dipili

nni yang menekankan adanya simbiosisme aga

siawi memadukan corak simbiosisme dan watak

an dasar negara, konstitusi negara, dan motto

ng merefleksi prinsip Jalan Tengah (*wasathiyah/ th*

embahasan terdahulu telah ditegaskan bahwa wawa

menjadi pendorong dan pendukung bagi terwujudnya wawasan kebangsaan Muhammadiyah di berbagai lembaga dan sektor. Berbagai bentuk ide dan wacana pemikiran, program kerja, agenda gerakan, dan amal usaha Muhammadiyah selama ini yang dikhidmatkan untuk kepentingan bangsa itu merupakan manifestasi dari semangat nasionalisme sebagai *civil society*.

Visi gerakan dan program kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Persyarikatan Muhammadiyah pada dasarnya merupakan partisipasi langsung dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen kebangsaan di Muhammadiyah dibangun dengan pertimbangan politik kebangsaan, bukan politik praktis sebagaimana yang dilakukan oleh partai politik. Dengan demikian, model program dan agenda gerakan yang direalisasikan oleh Muhammadiyah bisa menjadi modal sosial bagi bangsa ini untuk proaktif bagi penerapan wawasan kebangsaan. Secara langsung, nilai dan budaya baru akan berperan dalam pembentukan karakter bangsa sebagai kesadaran sikap serta manifestasi kepedulian terhadap negara ini.

Kultur yang memberikan tekanan pada partisipasi rasional di dalam struktur-struktur input politik dan proses sosial lainnya itu dalam banyak hal sejalan aksentuasi gerakan Muhammadiyah dalam proses penyadaran, pemberdayaan, dan pencerahan bangsa. Dengan demikian, kualitas bangsa dengan integritas kepribadian yang selalu tanggap, waspada dan peduli seperti itu akan menjadi modal sosio-kultural yang berharga untuk hidup secara merdeka, berdaulat, dan berwibawa. Modal dasar yang bertumpu pada kualitas sumberdaya dan integritas kepribadian bangsa seperti itulah yang akan menjadi

daya hidup bangsa ini di era globalisasi. Inilah komitmen Muhammadiyah dalam konteks kebangsaan di Indonesia.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya tentang beberapa relasi Islam, agama dan negara diatas, Indonesia cenderung memposisikan agama sebagai spirit bernegara. Indonesia tidak menganut kepada agama tertentu, namun negara berdasar kepada prinsip ketuhanan, dan negara memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warganya. Model relasi ini, memberikan landasan bagi Muhammadiyah yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia untuk berkomitmen menerapkan wawasan kebangsaan sehingga Muhammadiyah selalu berkontribusi untuk kemajuan negara Indonesia.

Wawasan kebangsaan Muhammadiyah harus ditunjukkan melalui perbuatan nyata, bukan dengan klaim dan retorika. Melalui gerakan praksis sebagai implementasi dari program kerja dan amal usaha, Muhammadiyah membuktikan komitmennya untuk selalu berkontribusi terhadap kemakmuran bangsa Indonesia. Adapun dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah mengagendakan revitalisasi visi dan karakter bangsa, serta semakin mendorong gerakan mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa yang lebih luas sebagaimana cita-cita kemerdekaan dengan menawarkan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju Indonesia berkembang. Dalam menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia yang lebih maju maka diperlukan transformasi kehidupan bangsa di berbagai bidang kehidupan.

Dasar Filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah yang dapat dijadikan acuan gerakan pendidikan untuk mencetak generasi bangsa yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan meliputi tujuh falsafah ajaran yang merupakan landasan bagi para pewaris Muhammadiyah. Tujuh falsafah ini telah mematrikan jiwa/ruh Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tujuh falsafah ajaran tersebut yaitu: 1) manusia hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh; sesudah mati, akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan; 2) apapun, sekali, dua kali, berulang-ulang, kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan yang dicintai itu sukar untuk diubah. 3) kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang telah diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau i'tikad, perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Jika ada yang akan mengubah, mereka akan sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah benar; 4) manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, bersama-sama menggunakan akal fikiran untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. 5) Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal i'tikad dan kepercayaannya, tujuan hidup dan tingkah lakunya serta mencari kebenaran sejati; 6) Pemimpin rakyat masih belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha menjadi golongan umat manusia dalam kebenaran; 7) Pelajaran terbagi atas dua bagian: belajar ilmu pengetahuan atau teori dan belajar amal mengerjakan atau mempraktikkan.

- Etos Welas Asih

Etos welas asih bersandar pada nalar dan moralitas yang memotivasi

insby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Etos Al Ma'un

Etos ini didasarkan pada Al-Qur'an yang diterjemahkan dalam tiga pilar kerja, yaitu: *healing* (pelayanan kesehatan), *feeding* (pelayanan sosial) dan *schooling* (pendidikan). Teologi ini pulalah yang diklaim mampu membuat organisasi ini bertahan hingga 100 tahun lebih dengan memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lain. Terdapat beberapa komponen pesan penting dalam kandungan dari surat al-Ma'un, yang menjadi inspirasi pergerakan Muhammadiyah, yaitu: pertama, orang yang menelantarkan kaum dhu'afa tergolong kedalam orang yang mendustakan agama. Kedua, ibadah shalat memiliki dimensi Sosial. Tidak akan berfaedah ibadah shalat seseorang jika tidak dikerjakan dimensi sosialnya. Ketiga, mengerjakan amal saleh harus ikhlas, tidak boleh diiringi dengan sikap riya. Keempat, orang yang bersikap egois dan egosentris, tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain digolongkan kedalam orang yang mendustakan agama.

Surat ini mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan amal sosial. Orang-orang yang mengabaikan anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dikatakan sebagai pendusta agama. Oleh karena itulah, dalam menjaga komitmen terhadap bangsa dan negara, Muhammadiyah ikut mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya demi memupuk wawasan kebangsaan Muhammadiyah.

- Etos Al ‘Ashr.

Didalam kandungan surat Al 'Ashr telah mencakup kehidupan dan sejarah peradaban umat manusia. Etos al-'Ashr membawa manusia ke arah kehidupan dunia dan akhirat yang berkemajuan dan berperadaban. Dalam membentuk sejarah peradaban umat manusia dalam dimensi ruang dan waktu, etos al-'Ashr memberikan empat prasyarat. Pertama, iman yang dapat dimaknai paradigma tauhid sebagai intisari peradaban Islam. Kedua, pelembagaan amal shaleh sebagai kerja pembangunan peradaban. Ketiga, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Kebenaran, al-haq, dipahami dalam konteks kebenaran relatif, yakni kebenaran IPTEKS yang dapat terus dikembangkan sesuai kemajuan zaman. Keempat, moralitas utama.

Etos al-‘Ashr memberikan pelajaran bahwa gerakan Muhammadiyah tidak hanya memikirkan tentang sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. Perubahan pasti terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Apabila terlalu lengah dan terjadi secara terus menerus maka yang didapatkan adalah kesengsaraan di dunia dan akhirat. Maka dari itu kita harus berhati- hati dan janganlah sampai lengah. Orang- orang yang mencari kemuliaan di dunia saja dan tidak bersungguh-sungguh, tidak akan mencapai keberhasilan, apalagi mencari keselamatan dan kemuliaan di akhirat.

Dasar filosofis diatas menjadi spirit kontribusi Muhammadiyah dalam gerakan amal usaha Muhammadiyah yang tidak hanya diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah, namun kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh bangsa sebagai wujud komitmen wawasan kebangsaan Muhammadiyah di negara Indonesia.

Kontribusi Muhammadiyah dalam wawasan kebangsaan demi keberlangsungan negara Indonesia bisa kita lihat dalam konteks historisnya. Konsistensi pendiri Muhammadiyah dalam keikutsertaannya menjalankan perjuangan demi memajukan bangsa Indonesia dapat di rasakan secara mutlak. Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan dan hasil pemikirannya untuk membuat perubahan dan mengatasi keterbelakangan kaum pribumi, memberantas pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang sistemik, maka Pemerintah Republik Indonesia menetakannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961.

Muhammadiyah memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kiai KH Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan ikut berjuang mencerdaskan dan memajukan bangsa. Bukti dari peran kebangsaan Beliau berdua adalah diangkatnya sebagai pahlawan nasional. Sebelum sumpah pemuda 1928, Muhammadiyah telah memelopori penggunaan Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia sebagai bahasa organisasi. Pada saat kongres tahun 1923, Muhammadiyah secara resmi telah menggunakan Bahasa Indonesia. Sangat banyak tokoh Muhammadiyah lainnya yang berkiprah dalam kemajuan bangsa Indonesia. Diantaranya adalah Srikandi Aisyiyah, Hayyinah, dan Munjiyah yang telah menjadi pelopor pergerakan perempuan atas lahirnya Konges Perempuan Pertama pada 1928. Tokoh empat serangkai Kiai Mas Mansur bersama Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Momentum penting saat penetapan Pancasila

Kontribusi Muhammadiyah telah terbukti melalui peran Soedirman dalam perang gerilya. Pada 1918 Muhammadiyah membentuk kepanduan Hizbhu Wathan atau Kepanduan Tanah Air yang bermakna pembela tanah air. Di era pasca proklamasi kemerdekaan, kader Muhammadiyah terus melanjutkan perannya dalam kebangsaan Republik Indonesia. Diantaranya Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo dan KH. Abdul Kahar Muzakkir yang turut merumuskan UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar Negara. Terdapat pula Perdana Menteri ke 10 (1957-1959) Ir. Juanda yang telah menjabat empat kali menjadi menteri di zaman Presiden Soekarno, yakni Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perhubungan. Peran kebangsaan Ir Juanda yang hingga kini terasakan ialah teretusnya Deklarasi Djoeanda pada 1957. Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang merupakan tokoh utama kemerdekaan dan proklamator beristrikan fatmawati, juga kader Aisyiyah. Beliau adalah putri Konsul Muhammadiyah Sumatra, Hasan Din. Soekarno mengakui telah lama berguru secara informal kepada Kiai Dahlan.

[illegible]

Terdapat tiga alasan mengapa organisasi Islam ini bersikap apresiatif dan proaktif dalam wawasan kebangsaan:

Kedua, Muhammadiyah ikut memperjuangkan kelahiran Republik Indonesia, karena sejak awal berdirinya pada tahun 1912 Muhammadiyah telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

[illegible]

peribadatan dan sarana lainnya yang dioperasikan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah namun secara terbuka dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Dalam memperkuat komitmen kebangsaannya, Muhammadiyah telah merumuskan satu pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah* pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar tahun 2015 yang lalu. Konsep ini menegaskan komitmen keIslaman dan keIndonesiaan yang perlu disebarluaskan secara terus menerus kepada segenap khalayak umum warga negara Indonesia khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah melalui berbagai bidang.

Sebagai ijtihad konsep *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah*, dalam konteks Negara Pancasila, merupakan upaya intelektual untuk adanya harmonisasi, kalau tidak rekonsiliasi, antara idealitas agama dan realitas politik di Indonesia. Walaupun Pancasila dan Islam berhimpit dan tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dalam Pancasila adalah Islami yang keduanya tidak perlu dipertentangkan, namun selalu ada yang berobsesi untuk mewujudkan konsep negara Islam atau negara syariat. Disinilah letak urgensi atau signifikansi konsep *Dārul ‘Ahdi Wa Shahādah* atau Negara Kesepakatan dan Kesaksian.

**PERUMUSAN MATERI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM
KURIKULUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**

1. Idealisme Pendidikan Muhammadiyah

Sebagai gerakan Islam dakwah *'amar ma'rūf nahī munkar* dan tajdid yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah, Muhammadiyah lahir dilatarbelakangi oleh serangkaian kompleksitas persoalan umat dan bangsa. Kejumudan tingkat keberagaman¹ serta terpuruknya pendidikan Islam² di Indonesia merupakan salah satu sebab kelahiran muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan mencoba mengurai benang merah persoalan bangsa. Dalam benak beliau, untuk mengatasi hal tersebut, hanya dapat dilakukan melalui reformasi pendidikan Islam³. Sepanjang sejarah hidupnya, KH Ahmad Dahlan tidak segan-segan merelakan diri untuk mewakafkan seluruh pikiran, harta benda dan tenaganya⁴ demi mewujudkan cita-cita mulia dalam membangun masyarakat Islam di Indonesia.

Kultur pendidikan Islam tradisional menjadi gagasan KH Ahmad Dahlan dalam reformasi pendidikan Islam. Paradigma reformasi pendidikan ini dibidikkan dalam rangka mengembalikan kemampuan pendidikan Islam untuk

² Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), 4.

⁴ Menurut catatan Sjoedja', Pada waktu itu Kiai Dahlan berupaya keras untuk mencukupi kebutuhan pengembangan sekolah. Untuk membiayai gaji guru-guru yang belum dibayar (dengan sangat terpaksa) beliau berhutang serta mengorbankan seluruh perkakas rumah tangga dan pakaian, kecuali beberapa saja untuk dijual dengan cara dilelang dan hasilnya untuk Muhammadiyah. Ibid, 42.

Inilah hakikat pendidikan Muhammadiyah yang merupakan hasil dari gagasan KH Ahmad Dahlan. Semangat reformasi pendidikan Islam masih relevan untuk kehidupan saat ini yang tidak mendikotomikan pengetahuan umum dengan ilmu agama. Pembaharuan pendidikan ini mendorong manusia untuk menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi. Implementasi konsep

¹⁴ Abbas Mahjub, *Ushul al Fikr at Tarbawi fi Al Islami* (Beirut: al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah, 1987), 16.

2. Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah

Telah banyak para pengamat dan pemikir yang memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang diselenggarakan Muhammadiyah. Di satu sisi, terdapat cendekiawan muslim yang mengatakan jika eksistensi Muhammadiyah hingga usianya telah mencapai satu abad (seratus tahun) ini disebabkan karena

¹⁵ Zalik Nuryana, “Revitalisasi Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah”, *Tamaddun*, (27 Januari, 2018), 2.

Muhammadiyah cenderung kooperatif terhadap setiap kebijakan yang muncul. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dan merugikan umat Islam, maka Muhammadiyah tetap akan akomodatif.

Pola gerakan yang dikembangkan Muhammadiyah cenderung ke arah pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah bukanlah organisasi politik layaknya partai politik yang bergerak di ranah politik, tetapi Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan. Hal inilah yang secara jelas membedakan Muhammadiyah dengan Syarikat Islam yang mengambil ranah politik dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam. Sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, Muhammadiyah telah berkontribusi terhadap bangsa dengan menyelenggarakan kegiatan pemberantasan buta huruf, pendirian lembaga-lembaga pendidikan, sosial ekonomi, dan juga menggiatkan kajian keagamaan. Realitas konteks historis inilah yang telah menjadikan Mitsuo Nakamura menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki banyak wajah.

Dalam fakta sejarah, Muhammadiyah telah mengembangkan pendidikan jauh sebelum negara Indonesia berdiri dan mendeklarasikan misinya untuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Muhammadiyah, pendidikan merupakan bidang kehidupan strategis yang memerlukan perhatian sangat besar. Sekolah yang didirikan KH Ahmad Dahlan diselenggarakan dengan sistem pendidikan modern yang kemudian dikembangkan secara luas setelah Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912.

Keadaan sosial yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan Muhammadiyah saat ini haruslah menjadi evaluasi. Pendidikan Muhammadiyah pada masa lalu mampu menunjukkan eksistensinya sebagai institusi modern dan layak menjadi tempat pengharapan masyarakat perkotaan serta kelas menengah. Pada masa sekarang posisi itu harus dipertahankan oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah, sehingga tetap mampu melahirkan generasi-generasi berkepribadian utuh sekaligus sanggup menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.¹⁹

¹⁹Syamsul Rijal, “Revitalisasi Pendidikan Kemuhammadiyah”, dalam <https://syamsulrijal.gani.wordpress.com/2011/06/29/revitalisasi-pendidikan-kemuhammadiyah/> (29 Juni 2011), 19.

yang berkenaan dengan pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Belum adanya konsep tersebut seringkali menjadikan pihak pelaksana pendidikan belum siap dalam menghadapi berbagai isu-isu pendidikan, seperti *deschooling society*, sekolah gratis, dan lain-lain.

Revitalisasi diharapkan mampu menjadikan pendidikan Muhammadiyah yang menghidupkan. Kerangka dasar dalam penyusunan landasan dan praktis revitalisasi diantaranya adalah: Pertama, kesadaran akan visi misi pendidikan Muhammadiyah. Kedua, penguatan sumber daya manusia. Selain itu, masih

Kesadaran dan kesepahaman visi misi pendidikan Muhammadiyah mutlak dilakukan dalam rangka revitalisasi pendidikan Muhammadiyah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dari pimpinan sampai pelaksana harian. Kesadaran akan pentingnya internalisasi Islamic Value melalui pendidikan Muhammadiyah menjadi fondasi revitalisasi. Pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah di daerah non kota yang menganut sistem pendidikan apa adanya harus diubah *mindset* nya.

Revitalisasi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Penggerak inilah yang akan mengawal internalisasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan Muhammadiyah

³⁰ Ibid.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui dua jalan, Pertama, untuk sumber daya manusia (SDM) yang sudah berada di Amal Usaha Muhammadiyah, dilakukan pembinaan dan refresh, baik segi ideologi Muhammadiyah maupun tentang keilmuan. Kedua, untuk sumber daya manusia (SDM) yang baru, diberikan pembekalan mulai dari *recruitment*, dilakukan pembinaan serta diberikan penanaman kesadaran bahwa fungsinya di Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan keilmuan tetapi juga internalisasi nilai-nilai keIslaman sesuai dengan faham agama menurut Muhammadiyah. dengan demikian perkaderan dalam tubuh Amal Usaha Muhammadiyah akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan untuk mewujudkan pendidikan Muhammadiyah yang berkemajuan.³¹

[illegible]

internasional. Amal usaha Muhammadiyah perlu melakukan proses inovasi yang merata dan signifikan dengan mengembangkan ide-ide dan metode baru dalam peningkatan kualitas dan keberadaan amal usaha Muhammadiyah. Melalui peningkatan kualitas yang lebih inovatif, amal usaha Muhammadiyah khususnya bidang pendidikan dapat lebih unggul serta mampu mengemban misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah.

Permasalahan Profesionalisme Guru juga menjadi tantangan yang harus di

Kedua, menumbuhkembangkan daya kritis dengan memberikan kebebasan kepada anak didik untuk mampu mengemukakan gagasan, pikiran dan perasaannya sehingga mampu melakukan aktualisasi diri.³⁷ Ketiga, pendidikan tidak berorientasi pada “*knowledge accumulation*”, dimana pendidikan sangat

³⁷ Farid Setiawan, dkk, *Mengokohkan Spirit Pendidikan Muhammadiyah*, 145.

berorientasi kepada perolehan materi pembelajaran untuk memperkuat peneguhan “intellectualism”. Pendidikan yang dipelajari haruslah lebih fungsional yang bermanfaat bagi masyarakat.³⁸

asing yang bersifat negatif tidak masuk dan merusak moral dan kepribadian generasi Muhammadiyah. Salah satu yang perlu terus dikembangkan adalah dengan terus memberikan materi Al Islam Kemuhammadiyah yang diharapkan dapat menjadi pencerah bagi para pelajar Muhammadiyah serta terus mengembangkan strategi pembelajaran yang kaya materi namun juga diimplementasikan ke dalam seluruh sendi kehidupan.

Di era globalisasi ini, pendidikan Muhammadiyah juga dituntut untuk berwawasan global. Konsep dasar pendidikan persyarikatan yang menekankan adanya penguasaan iptek yang berlandaskan spiritualitas Islam merupakan sebuah tuntutan dan sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Muhammadiyah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah Muhammadiyah senantiasa dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan yang dihasilkan oleh sistem global.⁴¹

1. Tinjauan Tentang Kurikulum Perguruan Tinggi

Pada SK Mendiknas No. 045/U/2002, Penyusunan kurikulum dimaksudkan untuk memaksimalkan pencapaian kompetensi. Proses penyusunan kurikulum tidak diperkenankan terfokus pada usaha pengelompokan matakuliah tetapi lebih ke arah pencapaian kompetensi yang mengandung elemen-elemen kompetensi yang meliputi: a) landasan kepribadian; b) penguasaan ilmu dan keterampilan; c) kemampuan berkarya; d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan; serta e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya dan keterampilan yang dikuasai.⁴⁴

⁴²Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020

⁴³ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000

⁴⁴ SK Mendiknas No. 045/U/2002

Landasan filosofis mengacu pada pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah. Dalam pengertian umum, filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam (Socrates) atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Filsafat berupaya mengkaji berbagai masalah yang dihadapi manusia,

Terdapat tiga sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya, dan pendidikan di Indonesia pada khususnya. Ketiga sistem filsafat tersebut, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Filsafat akan menentukan arah kemana siswa dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing kearah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan (dalam hal ini guru) akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Falsafah yang dianut oleh suatu negara bagaimanapun akan mewarnai tujuan pendidikan di negara tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya, disesuaikan dengan falsafah yang dianut oleh negara-negara tersebut.

⁴⁷ Ornstein C. Allan dan Francis P. Hunkins, *Curriculum, Foundation, Principles, and Issues* (Boston: Allyn and Bacon, 1988), 104.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang terorganisasi yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Kurikulum sebagai program atau rancangan pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya dari segi isi programnya tetapi juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Penerapan teori, prinsip, dan hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus sesuai dengan kondisi masyarakat setempat sehingga hasil belajar akan lebih bermakna dalam hidupnya.

Kebudayaan pada dasarnya merupakan pola kelakuan yang terdapat dalam masyarakat. Seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam tiga hal. Pertama; ide, konsep, gagasan, nilai, norma, dan

d. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Iptek

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap penyusunan kurikulum harus dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program. Oleh karena itu perlu menyusun sebuah panduan Capaian Pembelajaran (CP) yang diperuntukkan bagi penyelenggara program dalam mengkaji, mengoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan Capaian Pembelajaran (CP) lulusannya, agar rumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi Capaian Pembelajaran (CP) Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan dan antara iman dan kemajuan holistik. Dengan filosofi pendidikan Muhammadiyah itu maka mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah khususnya di PTM tentu harus mencerminkan perspektif tersebut. Malik Fadjar mengutip pernyataan AR Fakhruddin tatkala ditanya tentang hakikat pendidikan AIK bahwa hakikat pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah ialah Islam yang menggembirakan, Islam yang suka memberi, Islam yang *jembar* atau berpandangan luas, Islam yang membangkitkan dan menggerakkan.⁴⁸

⁴⁸ Tim AIK, *Pedoman Pendidikan AIK* (Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, 2013), 5.

⁴⁹ Ibid., 13.

⁵² Al-Qur'an , 18:110.

Gambaran manusia dengan sifat-sifat utama dalam Islam adalah sebagai khalifah dan abdullah. Penjabaran manusia sebagai khalifah selaras dengan definisi iman, yang tidak hanya pada dimensi *qolb* tetapi juga dimensi lisan dan *arkan*.⁵³ Sebagai khalifah, manusia bukan hanya menyembah dan mengagungkan Allah semata, tetapi juga harus berbuat baik kepada manusia dan alam sebagai sifat Rabb yang menciptakan, memelihara, menjaga, memiliki, mengayomi dan lain-lain. Manusia bukan saja berusaha menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya, melainkan perlu merefleksikan nilai-nilai Allah dalam aktivitas kehidupannya.

Pandangan tentang hakekat kehidupan sangat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Seseorang yang menganut paham spiritual-mistisisme (*mysticism*) memandang bahwa dunia adalah kefanaan total, dunia dan keinginan duniawi sebagai penghalang untuk menuju kepada Yang Hakiki, sehingga berupaya meninggalkan keinginan terhadap dunia. Sebaliknya, paham zuhud dalam tasawuf (asketis) berpandangan bahwa untuk mencapai keutamaan hidup yang berorientasi ukhrawi tidak harus meninggalkan kebutuhan duniawi. Intensifikasi pengabdian agama yang dijalankan dalam etos dan kegairahan kerja adalah gambaran dan pernyataan dari manusia terpilih menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan kandungan Surat al-Baqarah ayat 269 bahwa Allah memberikan anugerah berupa hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang

⁵³ Tim AIK, *Pedoman Pendidikan AIK*, 14-15.

Aspek substantif dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah meliputi tujuan, materi pokok dan sifat kurikulum AIK. Pembahasannya sebagai berikut:

AIK di PTM memandang Islam sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, modal sosial, jalan menuju Tuhan dan jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan AIK adlah untuk membentuk insan berkarakter dan insan terpelajar yang diharapkan memiliki integritas dan kesadaran etis. Bagi insan terpelajar, beramal shaleh yang baik yang bersifat ritual maupun sosial seharusnya tidak didasarkan pada faktor dari luar dirinya (ganjaran dan ancaman), melainkan sebagai bentuk panggilan etis, beramal shaleh sebagai manifestasi rasa terima kasih kepada Allah dan sesama. Pendidikan AIK untuk membentuk manusia berkemajuan, berjiwa pengasih dan penuh kasih kepada sesama (philantropis).⁵⁵

Pendidikan AIK adalah ilmu pengetahuan tentang Islam baik aspek normatif maupun historis. Materi pokok Pendidikan AIK meliputi lima aspek: al-Qur'an-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, dan Kemuhammadiyah. Materi AIK lebih

55 Al-Qur'an , 2: 269.

3) Sifat Kurikulum AIK

⁵⁶ Ibid., 17.

[illegible]

3) Peran Mahasiswa

4) Arah Pembelajaran

AIK ingin dipahami dalam konteks praksis pendidikan nilai. Hal ini dimaksudkan agar melalui pendidikan AIK dapat mendorong terjadinya perubahan cara berfikir (*mode of thought*) bahwa AIK bukan hanya aktivitas verbal (ceramah/ pidato/ retorika) menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan

[illegible]

5) Pendekatan Pembelajaran

6) Evaluasi Pembelajaran

⁶¹Syamsul Arifin, “Rekonstruksi Al Islam Kemuhmadiyah (AIK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai”, *Edukasi*, Vol. 13, No. 2 (Agustus 2015), 211.

⁶³ Syamsul Arifin, "Rekonstruksi Al Islam Kemuhammadiyah (AIK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai", 211.

- ### c. Tujuan Pendidikan AIK

- 1) AIK I: Membentuk sarjana muslim yang mengenal diri dan Tuhan, misi, tujuan dan manfaat hidupnya sebagaimana dituntunkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 2) AIK II: Membentuk sarjana muslim yang taat dan benar dalam beribadah, unggul dalam bermuamalah, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- 3) AIK III: Membentuk sarjana muslim sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah yang mampu beramar makruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) AIK IV: Membentuk sarjana muslim yang berjiwa dan berperilaku cendekia (ulul albab).

[illegible]

s sesuai jurusan/prodi masing-masing.
um ini kemudian disempurnakan
Islam dan Kemuhammadiyah Pengu
an oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP
andangan, tujuan, materi, metode, dan e

s sesuai jurusan/prodi masing-masing.
um ini kemudian disempurnakan
Islam dan Kemuhammadiyah Pengu
an oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP
andangan, tujuan, materi, metode, dan e

s sesuai jurusan/prodi masing-masing.
um ini kemudian disempurnakan
Islam dan Kemuhammadiyah Pengu
an oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP
andangan, tujuan, materi, metode, dan e

s sesuai jurusan/prodi masing-masing.
um ini kemudian disempurnakan
Islam dan Kemuhammadiyah Pengu
an oleh Majelis Pendidikan Tinggi PP
andangan, tujuan, materi, metode, dan e

Mengenai banyaknya karya intelektual Muhammadiyah, Hidayatullah menambahkan sebagai berikut:

Ibid.

⁷⁶ Hidayatullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 14 Desember 2019.

Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah berusaha mendesain Pendidikan AIK di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan optimal dengan harapan meningkatnya mutu dan relevansi Pendidikan AIK. Hal ini dikarenakan Pendidikan AIK di Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki peran strategis untuk gerakan pencerahan dan pembebasan tersebut terutama melalui sumbangannya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta sumber daya manusia terdidik yang bervisi dakwah amar ma'ruh nahi munkar dan tajdid. Untuk itu diperlukan keterpaduan niat, usaha dan doa yang sungguh-sungguh dari seluruh civitas akademika agar Pendidikan AIK benar-benar dapat menjadi kekuatan brand bagi PTM atau minimal menjadi ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang memiliki daya tarik bagi mahasiswa maupun orangtua.⁷⁷

[illegible]

Berikut ini deskripsi mata kuliah AIK III (Kemuhammadiyah) yang ditetapkan oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah dan wajib dijadikan acuan. Selanjutnya dosen pengampu AIK menjabarkan dalam bentuk Rancangan Program Pembelajaran (RPP) sesuai dengan karakteristik jurusan dan program studinya.

Tabel 3.1
Deskripsi Perkuliahan AIK III: Kemuhammadiyah⁷⁸

Fakultas: Jurusan/Prodi:	Semua Fakultas Semua Prodi
Strata Pendidikan	Sarjana Strata 1(S1) dan Diploma
Kode MK. : Nama MK. : Jml Jam/Kredit : Prasyarat :	AIK III (KEMUHAMMADIYAHAN) 100 menit/ Minggu (2 SKS)
Standart Kompetensi	- Memahami sejarah Muhammadiyah, - Memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah - Memahami nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek.
Kompetensi Dasar	- Menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah Muhammadiyah, - Menjelaskan dan menghayati nilai-nilai ideologi Muhammadiyah - Menjelaskan dan menghayati nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek
Sinopsis Isi Perkuliahan	Materi kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah III ini didesain untuk mengenalkan kepada mahasiswa ihwal gerakan Muhammadiyah dari berbagai sisinya. Untuk memberikan gambaran tentang pentingnya gerakan ini materi diawali dari islamisasi nusantara kemudian dirangkai dengan asal-usul dan makna kehadiran Muhammadiyah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, dan khittah Muhammadiyah. Untuk memberikan gambaran tentang gerakan Muhammadiyah, disajikan materi-materi mulai dari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, sebagai gerakan keagamaan, gerakan pendidikan, gerakan sosial, gerakan budaya, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan menjadi perhatian Muhammadiyah.

⁷⁸Tim AIK, *Pedoman Pendidikan AIK*, 34-35.

Rujukan Utama	A Hasyim. tt. Muhammadiyah Jalan Lurus. Abdul Mu'ti. 2009. Islam Berkemajuan Kisah Perjuangan KH. Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal. Al-Washath As'ad Abu Khalil. 1995. Revival and Renewal. Azhar Basyir. tt. Visi Misi Muhammadiyah Din Syamsudin (ed.). 1990. Muhammadiyah Kini dan Esok. Jakarta: Pustaka Panjimas. Haedar Nashir, 2006. Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah, Malang, UMM-Press Haedar Nashir. 2008, Khittah Muhammadiyah Bidang Politik, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah (SM) Haedar Nashir, dkk. 2009, Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Yogyakarta: SM. Haedar Nashir. 2010. Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, Yogyakarta: SM. Haedar Nashir. 2011. Muhammadiyah Abad Kedua. Yogyakarta: SM Hambali, Hamdan. 2010. Ideologi Muhammadiyah. Yogyakarta: SM Heri Sucipto dan Nadjamuddin Ramli. 2005. Tajdid Muhammadiyah, dari KH Ahmad Dahlan Hingga A. Syafi'i Ma'arif. Jakarta: Grafindo. Jarnawi Hadikusumo. Tt. Dua Belas Langkah Muhammadiyah Khazin dan Imam Syaukani (ed). 2000, Pembaharuan Islam; Konsep, Pemikiran dan Gerakan. UMM-Press. Kuntowijoyo, 2001, Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental. Bandung: Mizan. Ma'arif, A. Syafii, dkk., 2010. Menggugat Modernitas Muhammadiyah, Jakarta: Best Media Utama. Majelis Dikti PP. Muhammadiyah. 2010. 1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan. Mulkhan, A.M., 2013. Marhenis Muhammadiyah; Ajaran dan Pemikiran KH Ahmad Dahlan, Yogyakarta: Galang Pustaka. Mulkhan, A.M., 2005. Kisah dan Pesan Kiai KH Ahmad Dahlan, Yogya: Pustaka SP. Mustafa Kamal Pasha dan Adabi Darban. 2003. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam. Yogyakarta: LPP UMY. PP Majelis Tarjih. Adabul Mar'ah fil Islam. PP. Muhammadiyah cet. Ke3 2007. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Yogyakarta, Suara Muhammadiyah PP. Muhammadiyah, 2009. Berita Resmi Muhammadiyah, Yogyakarta, PT. SSU. PP. Muhammadiyah. Cet. Ke 2 2010. Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan langkah. Yogyakarta Suara Muhammadiyah R. Hadjid. Tt. Tujuh Falsafah dan Tujuh Belas Kelompok Ayat KH Ahmad Dahlan. Suara Muhammadiyah Suwito & Fauzan (ed), 2003. Sejarah Para Tokoh Pendidikan, Bandung, Angkasa Syafii Maarif, dkk. 2005. Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, Yogyakarta: Majelis Tajih dan Tajdid & UAD. TPAI. 1992. Muhammadiyah: Pemikiran, Gerakan dan Amal Usaha. UMM Press Wawan Gunawan. 2005. Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah. MTPPI PPM Yunahar Ilyas. Kesetaraan Gender dlm al-Qur'an. Yogya: Labda Press Yunus Salam. 2009. KH Ahmad Dahlan: Amal dan Perjuangannya. Al-Washat Yusuf Abdullah Puar. 1989. Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, Jakarta: Pustaka Antara.
Sitem perkuliahan	Perkuliahan reguler yang diperkaya dengan tutorial atau asistensi
Sistem Evaluasi	Portofolio: 10% Tutorial : 10% Tes Tengah Semester dan Ujian Final: 60%

Agar proses internalisasi nilai-nilai dalam materi perkuliahan AIK III dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka harus menganalisis muatan nilai-nilai yang menjadi core pada kompetensi dasar. Dari data deskripsi perkuliahan AIK III diatas, standart kompetensinya meliputi: 1) memahami sejarah Muhammadiyah; 2) memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah; dan 3) memahami nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek. Sedangkan kompetensi dasar, meliputi: 1) menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah Muhammadiyah; 2) menjelaskan dan menghayati nilai-nilai ideologi Muhammadiyah, dan 3) menjelaskan dan menghayati nilai perjuangan Muhammadiyah dalam berbagai aspek.

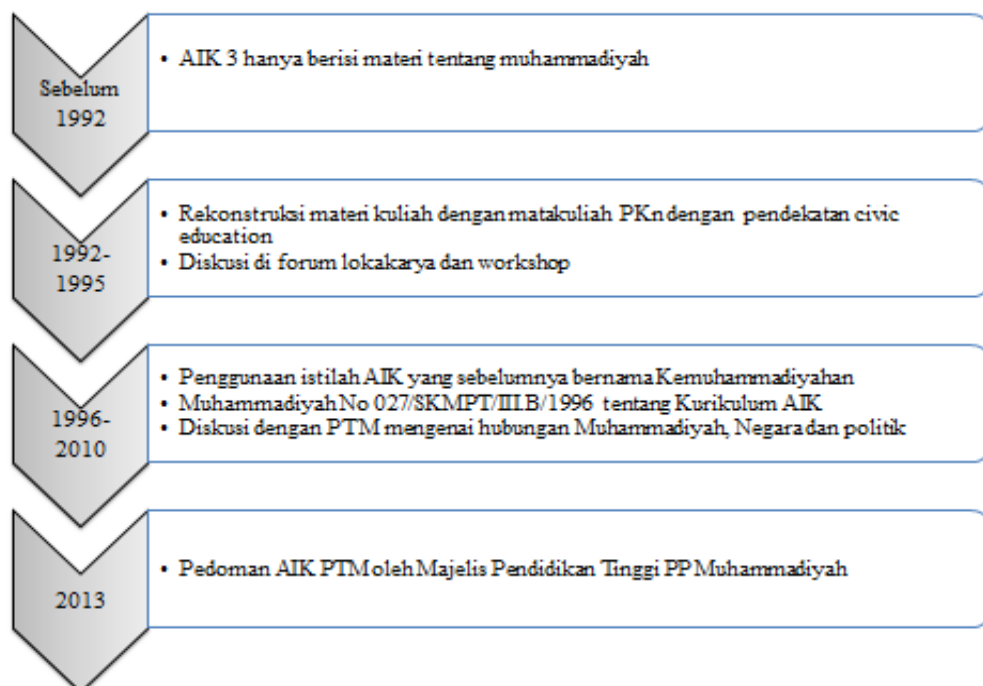
Hasil Analisis dari deskripsi perkuliahan AIK III diatas menunjukkan bahwa adanya kesamaan muatan nilai antara standart kompetensi dengan kompetensi dasar untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi dari kurikulum AIK III. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam upaya menginternalisasikan nilai-nilai dalam materi di perkuliahan AIK III, khususnya pada materi wawasan kebangsaan.

Kualitas pembelajaran tentunya tidak dapat dilepaskan dari seperangkat pembelajaran. Strategi dosen pengampu harus digunakan secara optimal dalam pembelajaran untuk mengejawantahkan rumusan nilai- nilai yang terkandung dalam materi AIK III. Dari nilai-nilai yang dirumuskan dalam standart kompetensi dan kompetensi dasar diharapkan bisa terinternalisasi dalam diri mahasiswa yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan praksis, baik melalui kegiatan internal maupun eksternal kampus.

AIK III. Rekonstruksi ini dipertimbangkan atas dasar sebuah peneguhan tentang komitmen dan konsistensi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan negara dan bangsa. Berdasarkan konteks historis, Muhammadiyah merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuatan nasional yang sejak berdirinya terlibat aktif dalam perjuangan politik kebangsaan serta membangun bangsa melalui gerakan dakwah berorientasi pembaruan. Sebagai kekuatan nasional, Muhammadiyah telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan dan melalui para tokohnya terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara tetap berlanjut secara konsisten.

Proses perumusan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK III dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.2
Proses Perumusan Materi Wawasan Kebangsaan



Karena itulah dalam penyusunan materi Al Islam dan Muhammadiyah haruslah menggambarkan pandangan Islam yang berkemajuan dan mencerahkan sebagaimana yang menjadi karakter gerakan Muhammadiyah dan keteladanan tokoh Muhammadiyah. Dari rahim pendidikan Muhammadiyah diharapkan lahir generasi muslim terpelajar yang kuat iman dan kepribadiannya, sekaligus mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman.

Melalui perspektif status quo (*the status quo perspective*) desain kurikulum

Kegiatan-kegiatan utama dalam masyarakat yang disarankan untuk menjadi isi kurikulum Al Islam dan Kemuhamamdiyahan III adalah kegiatan dalam kehidupan sosial seperti bergaul dan berkelompok dengan orang lain; kegiatan yang berhubungan dengan religius; serta kegiatan praktis yang bersifat kemanusiaan dan kebangsaan.

Kurikulum Al Islam dan Kemuhamamdiyahan III juga dikembangkan dengan perspektif pembaharuan (*the reformist perspective*.) Pendidikan dalam perspektif ini harus berperan untuk mengubah tatanan sosial masyarakat dengan mengaktualisasikan nilai-nilai. Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah III diharapkan dapat mengabdikan diri demi tercapainya kesejahteraan sosial serta kemakmuran bangsa yang lebih adil dan merata.

Perspektif masa depan (*the futurist perspective*) yang paling sering digunakan dalam desain pengembangan kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah III. Perspektif ini menitikberatkan kepada proses mengembangkan hubungan antara kurikulum dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Desain kurikulum ini lebih mengutamakan kepentingan sosial dari pada kepentingan individu. Dalam materi wawasan kebangsaannya terkandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia.

**INTERNALISASI NILAI KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH UNTUK
MENGAKTUALISASIKAN MATERI WAWASAN KEBANGSAAN DI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

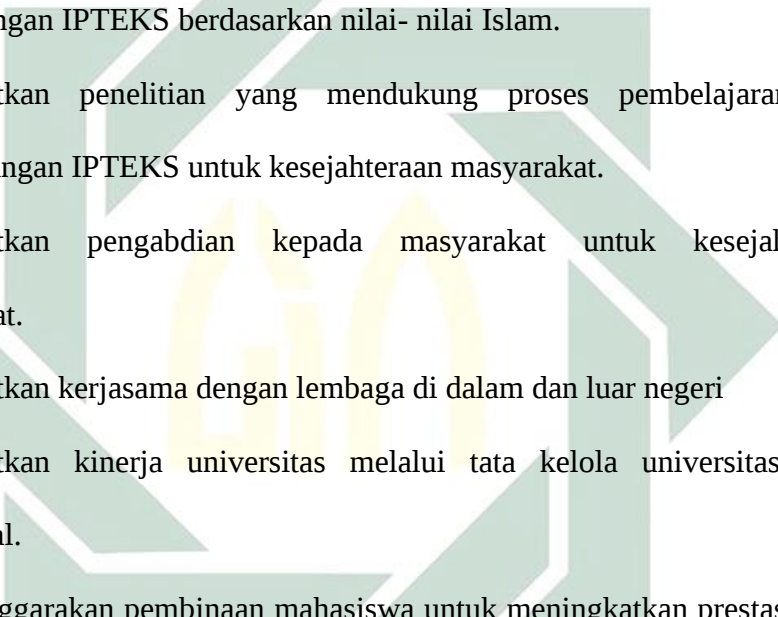
1. Profil Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dalam sejarahnya, UMSIDA dirintis sejak tahun 1984 dengan membuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya pada tahun 1990 membuka Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP). Pada tahun 2000, semua Sekolah Tinggi yang ada secara resmi digabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Sampai dengan semester ganjil tahun akademik 2018/2019 UMSIDA memiliki 9 Fakultas dan 27 Program Studi, kemudian pada tahun ini UMSIDA melakukan perampingan fakultas, dari 9 fakultas menjadi 5 fakultas, yaitu: 1) Fakultas Agama Islam, dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2), PAI (S1), PBA (S1), PGMI (S1), Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) (S1), dan Perbankan Syariah (S1). Selain itu juga ada Ma'had Putri Umar Bin Khattab, dengan Prodi Bahasa Arab dan Studi Islam (D2) dan Tahfidz al-Qur'an (D2); 2) Fakultas Sains dan Teknologi yang merupakan penggabungan dari Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian, dengan Prodi Informatika (S1), Teknik Mesin (S1), Teknik Industri (S1), Teknik Elektro (S1), Agroteknologi (S1), dan Teknologi Hasil Pertanian (S1); 3) Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan yang merupakan penggabungan dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan prodi Psikologi

Dari 5 Fakultas dan 27 Prodi tersebut, pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019 UMSIDA memiliki 9365 mahasiswa aktif dan pada semester genap ini berjumlah 8.990 mahasiswa aktif yang tersebar di Kampus Majapahit, Kampus Gelam, dan Kampus Pilang. Jumlah mahasiswa yang masuk setiap tahun mengalami peningkatan.

UMSIDA dengan visinya, selalu berusaha mengembangkan dan meningkatkan dirinya. Dalam dinamika Pendidikan Tinggi, UMSIDA selalu

Visi: Menjadi perguruan tinggi unggul dan inovatif dalam pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.



- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai- nilai Islam.
- Meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri
- Meningkatkan kinerja universitas melalui tata kelola universitas yang profesional.
- Menyelenggarakan pembinaan mahasiswa untuk meningkatkan prestasi yang berkepribadian Islami.

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam penguasaan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.
- b. Menghasilkan penelitian untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

[illegible]

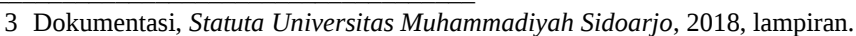
- d. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri untuk penguatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- e. Mewujudkan kemandirian perguruan tinggi dengan tata kelola yang profesional berdasarkan nilai- nilai Islam
- f. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

Sasaran:

- a. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan dan pengembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam.
- b. Peningkatan kapasitas dan kinerja penelitian dosen dan mahasiswa yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan IPTEKS.
- c. Peningkatan manfaat hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Peningkatan kapasitas dan kinerja pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
- e. Peningkatan dan perluasan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.
- f. Penguatan tata kelola dan kelembagaan secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam.
- g. Peningkatan etos kerja dan perilaku organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
- h. Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam pencapaian prestasi.

Matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah dibawah naungan Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah (LIK). Semua kegiatan yang berkaitan dengan

Bagan 3.1 Struktur Organisasi UMSIDA³



3. Peran Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah

Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di lembaga pendidikan Muhammadiyah memegang peranan yang sangat penting untuk membentuk insan yang susila, berkarakter dan berkepribadian muslim (*learning to be*). Tolak ukur keberhasilan pendidikan AIK yang paling pokok terletak pada perubahan sikap (*attitude*), mental dan tingkah laku para siswa. Sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah bahwa peranan pendidikan Al Islam dalam Muhammadiyah adalah untuk membina pribadi generasi muda, agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi rasional dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁴

Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah bertujuan untuk: Pertama, Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Al Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt., sesuai al-Quran dan As-Sunnah; Kedua, Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlakul Karimah, yaitu jujur, adil, etis, bertoleransi (*tasammuh*), berdisiplin, menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya Islami dalam komunitas sekolah sesuai al-Quran dan As Sunnah; Ketiga, Menanamkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ajaran Islam serta

⁴ Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al Islam dan Kemuhmadiyah* (Jakarta: Majelis Dikdasmen, 2007), 1.

⁶ Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah*, 2.

Ketiga, Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketauhidan, keindividualan, kesosialan dan moral.

Kelima, Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam terkadang menjadi pendidik (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang dimasyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sebagai sumber belajar, contoh dan teladan).

Keenam, Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah demi keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

Ketujuh, Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

Pendidikan dan pengembangan nilai dalam Pendidikan Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari semangat pengajaran surat al-Ma'un sebagaimana yang dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan. Dalam konteks pembelajarannya, KH Ahmad Dahlan memfokuskan makna normativitas nash-nash lebih kontekstual. Kontekstualisasi tersebut dijalankan dengan mengaitkan dan mempertautkan secara langsung terhadap persoalan-persoalan sosial umat secara aktual. Semangat pengajaran surat al-Ma'un inilah yang melahirkan kesadaran kritis umat untuk melakukan berbagai amal nyata sebagai produk keberagamaan Muhammadiyah.

Seiring perkembangan zaman, Muhammadiyah telah berkomitmen untuk membangun Indonesia berkemajuan. Melalui pendidikan, Muhammadiyah membentuk kepribadian yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mencetak insan muslim Indonesia yang berbuat kebajikan dalam seluruh sendi kehidupan, dimulai dari lingkungan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan global. Bukan hanya mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian. Wujud pembelajaran inilah yang diimplementasikan dalam pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyah. Hal ini sesuai dengan maksud KH Ahmad Dahlan, bahwa pendidikan yang dikelola Muhammadiyah bertujuan untuk membentuk karakter dan watak yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Menurut John Dewey, istilah "value" mempunyai dua makna. Di satu sisi, nilai adalah menunjukkan sikap terhadap harga sesuatu, menemukan harga yang sementara untuk menemukan harga yang murni. Hal Ini dinamakan sebuah pengalaman yang lengkap, dan untuk menilainya adalah dengan memberikan apresiasi. Tetapi menilai juga merupakan sebuah aktivitas intelektual yang riil untuk melakukan keputusan dan perbandingan dalam membuat evaluasi. Ini terjadi ketika pengalaman langsung yang sempurna sudah berkurang dan muncul pertanyaan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bervariasi dari sebuah keadaan perlakuan yang istimewa untuk memperluas atau menjangkau sebuah realisasi yang maksimal atau pengalaman yang sangat penting.¹⁰

Proses internalisasi nilai kebangsaan yang diimplementasikan melalui materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK III jika dianalisa berdasarkan jenis pendidikannya, termasuk jenis pendidikan melalui orang lain (*education by another*). Para dosen AIK sengaja menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam diri mahasiswa dengan harapan bisa diaktualisasikan ke dalam kegiatan nyata (praktis) melalui program internal kampus maupun program amal usaha Muhammadiyah.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diamanatkan dalam membentuk perilaku manusia.¹²

[illegible]

Dewey mengklaim bahwa ilmu pengetahuan tentang pengalaman-pengalaman sosial harus diterjemahkan ke dalam materi ajar secara mendetail dan konkret. Karena pengetahuan dalam materi ajar telah dipilih dan diorganisir terlebih dahulu sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas manusia, menolong pendidik memandu para peserta didik untuk menginterpretasikan makna dari reaksi-reaksi mereka sendiri. Dalam melakukan pembelajaran, pendidik tidak hanya menguasai *subyek matter* (isi) semata, tetapi juga yang lebih penting adalah memberikan perhatian untuk merespons dan bersikap pada peserta didik supaya memahami bagaimana proses-proses belajar berinteraksi dengan materi ajar dan lebih jauh lagi adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan pikiran peserta didik tentang materi ajar tersebut.¹³

Menurut Dewey,¹⁴ ada tiga tahap pengalaman peserta didik yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan materi ajar, yang meliputi; tahap pertama,

¹⁴ Ibid., 192-196.

ilmu pengetahuan sebagai kandungan kemampuan intelegensi, yaitu adanya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tahap ini dikenal sebagai materi yang diungkapkan dengan memperkenalkan benda-benda. Jika para peserta didik dimotivasi untuk belajar, maka materi ajar tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan kebutuhan peserta didik. Jadi, pengenalan rangkaian pembelajaran secara alami tentang perkembangan harus selalu dimulai dengan situasi-situasi yang melibatkan belajar dengan melakukan (*learning by doing*), seperti menggunakan benda-benda yang konkret.

Tahap yang kedua, menyarankan pendidik memperkenalkan benda-benda, dan menggunakannya dengan sebuah tujuan tertentu. Peserta didik harus melakukannya dengan sangat sering sehingga dapat mengantisipasi bagaimana benda itu akan bereaksi dan bertindak. Dalam proses belajar disebut dengan makna pengenalan. Kemudian, materi ajar harus diberikan secara sedikit demi sedikit kedalam "*information*" atau "*communicated subject matter*", yang oleh Dewey disebut dengan "*indirect knowledge*". Tahap ini materi ajar fokus pada komunikasi sosial termasuk pendengaran dan berbicara dengan orang lain dan membaca buku-buku yang dapat menyesuaikan koneksi yang sama dengan orang lain secara efektif dan berkelanjutan. Artinya, menjadi bagian dari komunikasi bersama ini adalah seseorang belajar lebih banyak dari yang lain, untuk para peserta didik yang telah merubah pengalamannya menjadi pengetahuannya. Informasi ilmu pengetahuan ini dengan melakukan pengetahuan mendengar dan membaca dari yang lain adalah satu jenis pengetahuan tidak langsung.

Tahap yang ketiga, materi ajar adalah memperluas dan bekerja dengan logis yang mengorganisir materi dari pakar tentang pelajaran tersebut. Sains adalah pengetahuan yang dirasionalisasikan, yaitu dia merepresentasikan dalam level-levelnya, menghasilkan pembelajaran yang sempurna, yaitu perwujudannya.

2. Internalisasi Nilai Dalam Kurikulum AIK III

Untuk mengawali perkuliahan, para pengampu matakuliah AIK melakukan kegiatan pra-instruksional yang bertujuan untuk mengondisikan

yang disepakati bersama dan diwujudkan menjadi falsafah hidup serta identitas suatu bangsa melalui proses konstruksi sosial. untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak dapat menghindari adanya eksternalisasi individu. Sehingga perlu adanya internalisasi agar terbentuk kesadaran subjektif, sehingga terjadi proses aktualisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Bangsa Indonesia mengandung nilai kebangsaan yang mengakar dalam budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud sikap dan perilaku yang nampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai kebangsaan tersebut dapat menghilang apabila tidak di internalisasikan atau ditanamkan kepada generasi bangsa, terutama pada generasi muda sebagai tonggak pembangunan.

Untuk itulah Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah melakukan rekonstruksi kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK III) dengan menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam materinya. Nilai-nilai kebangsaan yang diinternalisasikan dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK III) meliputi nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai semangat kebangsaan dan nilai cinta tanah air.

Nilai religius merupakan nilai kerohanian seseorang yang bersumber dari keyakinan ketuhanan sebagai implementasi dari ketakwaan terhadap ajaran agama yang dianutnya baik perilaku yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan serta kebangsaan. Dari definisi ini, nilai religius terinternalisasi pada hampir seluruh materi tentang sejarah dan gerakan

Muhammadiyah, misalnya dalam materi Pemurnian dan pembaharuan di dunia Muslim; materi iman keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah serta Pemikiran & gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah; serta materi Mukadimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

Nilai kemanusiaan dapat diartikan sebagai nilai yang dijalankan dengan penuh kesadaran secara pemikiran, sikap dan perilaku didalam menegakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kemuliaannya yang sesuai dengan nilai akidah dan moral. Nilai kemanusiaan terimplementasi pada materi pemikiran & gerakan Muhammadiyah dalam bidang muamalah duniawiyah; materi kepribadian Muhammadiyah yang meliputi hakekat Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan sifat Muhammadiyah; serta materi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial yang meliputi nilai-nilai dan ajaran sosial-kemanusiaan Muhammadiyah (teologi al-ma'un), gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim, bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah, dan revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah.

Nilai toleransi sebagai sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Materi AIK III yang mengandung nilai toleransi diantaranya adalah materi dakwah Islam di nusantara yang membahas keragaman proses masuknya Islam ke Nusantara; materi Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan, yang meliputi cara KH Ahmad Dahlan memberdayakan perempuan, kesetaraan gender

dalam Muhammadiyah, serta peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Didalam materi ini sangat nyata sekali bahwa gerakan Muhammadiyah sangat menjunjung sikap toleransi terhadap kaum perempuan. Nilai toleransi juga terinternalisasi dalam materi peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia yang meliputi khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, serta bentuk/model peran kebangsaan Muhammadiyah. Dalam materi peran kebangsaan ini Muhammadiyah sangat toleran terhadap perbedaan agama, suku, dan etnis.

Nilai semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai ini terinternalisasi dalam materi sejarah Muhammadiyah yang dalam faktor subyektifnya terdapat keprihatinan dan keterpanggilan KH Ahmad Dahlan terhadap umat dan bangsa; materi kepribadian Muhammadiyah yang didalamnya terdapat pedoman dan dasar amal usaha Muhammadiyah yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa; materi Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan; materi peran perempuan Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; materi Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi serta materi peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia yang meliputi khittah muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, tanggungjawab Muhammadiyah terhadap NKRI, serta bentuk/model peran kebangsaan Muhammadiyah.

Nilai-nilai kebangsaan diatas sebagai capaian pembelajaran dari perkuliahan materi kebangsaan dalam matakuliah AIK III. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian diatas bahwa proses internalisasi nilai kebangsaan yang diimplementasikan melalui materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum AIK III termasuk jenis pendidikan melalui orang lain (*education by another*). Dari

C. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan

Bagi Dewey, sebuah akhir dari pendidikan adalah pertumbuhan atau rekonstruksi pengalaman yang akan selalu mengarah ke pengalaman berikutnya. Jadi, pendidikan adalah sebuah proses yang tidak memiliki akhir. Pertumbuhan dalam konteks Dewey berarti bahwa individu mendapatkan kemampuan untuk melihat hubungan antara berbagai pengalaman, antara satu proses belajar ke proses belajar lainnya. Tesis Dewey menyatakan bahwa yang diinginkan pendidikan adalah memberikan kontribusi pertumbuhan untuk menuju pada tujuan berikutnya.¹⁸ Pandangan ini menjadi sebuah dasar analisa untuk mengkaji proses

¹⁸ Siti Sarah, "Pendekatan Fisafat Pragmatis John Dewey Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Fisika", *Prosiding FITK UNSIQ*, Vol.1, No. 1 (Februari, 2018), 74.

Dari proses perkuliahan materi wawasan kebangsaan diharapkan menumbuhkan pengalaman belajar yang berupa nilai-nilai kebangsaan dan akan selalu mengarah ke pengalaman berikutnya. Dalam hal ini, nilai-nilai yang dihasilkan dari pengalaman belajar diharapkan memberikan kontribusi pada kegiatan praktis. Dewey memandang bahwa tipe pragmatisme diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Begitupun juga dalam proses internalisasi nilai kebangsaan ini yang harus memiliki jangkauan untuk mengaktualisasikan ke program kegiatan, baik internal maupun eksternal. John Dewey juga menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, merdeka, kreatif serta dinamis. Manusia memiliki kemampuan untuk bekerja sama untuk membangun masyarakat. Pandangan ini sebagai spirit untuk selalu mengaktualisasikan ilmu yang kita dapat demi membangun masyarakat Indonesia seutuhnya.

¹⁹ Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2003), 84.

1. Aktualisasi Materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Internal di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Gagasan pembentukan barisan kepanduan Hizbul Wathan dalam Muhammadiyah muncul dari KH Ahmad Dahlan ketika beliau kembali dari perjalanan tabligh di Surakarta. Muhammadiyah yang didirikan atas gagasan KH Ahmad Dahlan pada tahun 1920 M.²⁰ Istilah Hizbul Wathan memiliki arti yang sama dengan istilah pembela tanah air. Salah satu tujuannya adalah membentuk kepribadian calon Pemimpin bangsa yang sarat akan nilai-nilai kebangsaan.

[illegible]

Kerelaan Berkorban Untuk Bangsa dan Negara diimplementasikan dengan ikut serta menjadi relawan untuk membantu korban bencana alam, kemampuan awal bela negara diimplementasikan dengan memberikan penguatan mental, menanamkan keberanian dan melatih fisik siswa dengan kegiatan yang dilaksanakan di lapangan seperti PBB, Semaphore, dan pendirian tenda.

[illegible]

Sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang notabene institusi pendidikan dalam naungan amal usaha Muhammadiyah, menyelenggarakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muhammadiyah untuk Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembelajaran dan pemberdayaan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah '*amar ma'rūf nahi munkar*' oleh beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah. KKN Muhammadiyah untuk Negeri dilaksanakan dengan prinsip *co-creation* (gagasan dari berbagai pihak terkait), *co-financing* (dukungan dari berbagai pihak terkait), *flexibility* (menyesuaikan dengan situasi kondisi lingkungan dan kebutuhan pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah), *sustainability* (kegiatan harus melahirkan pembangunan/pengembangan berkelanjutan di tengah masyarakat sasaran), dan *research based community services* (setiap kegiatan didasarkan/ dilaksanakan berdasarkan hasil kajian ilmiah).²⁵

a. membangun silaturahmi antara Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan warga persyarikatan Muhammadiyah

²⁶ Ibid., 4-5.

b. memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa mengenai cara berpikir dan bekerja interdisipliner.

d. membina mahasiswa agar menjadi seorang *motivator*, *innovator*, dan *problem solver*.

f. melibatkan mahasiswa dalam menggairahkan kegiatan Keislaman pada umumnya maupun Kemuhammadiyah.

g. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk turut serta dalam berkontribusi untuk pembangunan dunia pendidikan.

[illegible]

1. Bagi Mahasiswa

- ²⁷ Ibid., 4-7.

7) Secara khusus bagi Perguruan Tinggi Muhammadiyah, KKN diarahkan pula pada: a) Pemerluasan pemahaman dan penghayatan mahasiswa tentang kenyataan kehidupan keagamaan di masyarakat; b) Pemupukan semangat solidaritas atau kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat pedesaan; c) Penumbuhan semangat pengabdian mahasiswa dalam memecahkan kemiskinan rohaniah sebagai realisasi dari *'amar ma'rūf nahī munkar* dalam kehidupan nyata masyarakat Islam di pedesaan. d) Penumbuhan pemahaman dan kesediaan belajar secara nonformal maupun informal di tengah masyarakat dan/atau lingkungan pemerintah. e) Pelatihan terhadap mahasiswa dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang bermotivasi keislaman; f) Pembelajaran bagi para mahasiswa di bidang keagamaan, keterampilan, maupun kemasyarakatan. g) Penumbuhan dan pengembangan gairah kegiatan Muhammadiyah, bagi desa yang memiliki Ranting Muhammadiyah.

1) Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan di masyarakat dan/atau untuk melaksanakan proyek pembangunan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah; 2) Memperoleh cara-cara baru atau inovasi di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan; 3) Memperoleh pengalaman, cara berpikir, bersikap, dan bertindak untuk menggali dan

c. Bagi Perguruan Tinggi

hkan pada: a) upaya memperkuat kesadaran tentang pentingnya keagamaan dalam kehidupan yang majemuk yang dilandasi dengan keyakinan yang kokoh dan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai agama; b) bimbingan dalam berbagai masalah kehidupan secara menyeluruh dan komprehensif agama; c) penumbuhan rasa tanggung jawab akan peran agama dalam membangun keluarga sejahtera melalui pemahaman yang benar tentang konsep-konsep agama; d) upaya menumbuhkan pemahaman yang benar tentang asyarakat Islami; serta d) upaya menumbuhkan pemahaman yang benar tentang hubungan antara nilai-nilai dan ajaran Islam dengan realitas hidup sehari-hari. Hal ini akan berimplikasi dalam partisipasi di segala bidang pembangunan.

Dari tujuan dan sasaran diatas, dijelaskan bagaimana upaya Muhammadiyah dalam meneguhkan komitmennya terhadap kemakmuran bangsa. Sehingga mahasiswa yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam memakmurkan bangsa, berusaha keras untuk mendaftar menjadi peserta KKN Muhammadiyah. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu peserta KKN-Mu Umsida, Esvina. Dia menuturkan, “ saya ingin mengamalkan nilai kemanusiaan saya dengan mengikuti KKN Mu karena ingin bersama-sama dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi muhammadiyah lain untuk berperan serta dalam memajukan tanah air, khususnya dipelosok pedesaan.”²⁸

[illegible]

dalam diri mahasiswa sehingga mereka membutuhkan wadah untuk mengaktualisasikan nilai tersebut. Rizki Dwi Anggraini, peserta lain dari KKN Mu menjelaskan sebagai berikut:

“Saya sangat tertarik untuk mengikuti program KKN Mu karena terpengaruh oleh beberapa hal. Pertama, dari pihak keluarga, saya dibesarkan dari keluarga Muhammadiyah. Sehingga dukungan dan motivasi memihak ke situ. Kedua, selama perkuliahan AIK di semester 3, telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya bahwa dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah sangat berkontribusi untuk negara Indonesia. Hal ini semakin meyakinkan saya, bahwa saya harus punya sikap nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat terhadap bumi Indonesia. Yang akhirnya saya bertekad bulat untuk mengikuti program KKN Mu ini, dan Alhamdulillah saya bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia yang membutuhkan.”²⁹

Antusiasme mahasiswa yang mendaftar KKN Mu pun diakui oleh Puspita Handayani, selaku panitia KKN Mu. Beliau menyampaikan, “Alhamdulillah, mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti program KKN Mu. Ini berarti semangat kebangsaan mahasiswa semakin kokoh. Dan saya sendiri, kebetulan dosen AIK merasa bangga bahwa apa yang saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan seakan membuahkan hasil.”³⁰

Deskripsi diatas menunjukkan bahwa materi kebangsaan dalam matakuliah AIK III memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan pada mahasiswa, sehingga mereka mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Jauhnya wilayah atau tempat KKN Mu tidak menjadi halangan bagi mahasiswa. Hanya asas Kemanfaatan untuk sesama yang diharapkan dari peserta KKN Mu

²⁹ Rizki Dwi Anggraini, *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Februari 2020.

³⁰ Puspita Handayani, *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Februari 2020.

Dedikasi mahasiswa ini membuktikan pandangan John Dewey bahwa pendidikan harus memberikan kesempatan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kesempatan diberikan dengan jalan berbuat secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan pengalaman sebagai modal berharga dalam berfikir kritis, serta produktif dan berbuat susila.³¹

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001 juga merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa Indonesia. PKM memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak diluncurkannya, PKM memperoleh respon positif, baik di kalangan mahasiswa maupun pimpinan perguruan tinggi. Hal ini tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi dan proposal yang diunggah mahasiswa.³²

Secara umum PKM bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang (1) tahu dan taat aturan; (2) kreatif, inovatif dan (3) objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. PKM menumbuhkembangkan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), *Creative Thinking* melalui implementasi filosofi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu (1) Pendidikan dan pengajaran; (2) Penelitian

³² Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2020: Buku Panduan Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. i.

2. Penelitian Eksakta (PKM- PE); bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab-akibat, aksi-reaksi, rancang bangun, perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya baik dalam aspek eksperimental maupun deskriptif.

3. pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer.

5. PKM-M; bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit.

³³ Ibid., 3.

Klinik Bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak dan lain-lain.

7. PKM-KC; bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Karya cipta dari PKM-KC ini tidak meniru produk eksisting baik di dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan/atau fungsinya.
8. PKM-AI; Merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (misalnya studi kasus, praktik lapang, KKN, PKM, magang) yang bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah.
9. PKM-GT; bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, yang berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan.
10. PKM-GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi dan nalarnya, memikirkan tatakelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia.

Dari beberapa jenis PKM diatas, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sangat antusias untuk ikut andil dengan mengambil judul bervariasi sesuai dengan ketentuan skema yang dipilih. Didalam masing-masing penulisan karya ilmiah mahasiswa telah terinternalisasi nilai-nilai kebangsaan

di segala bidang, meliputi bidang pendidikan, budaya, politik serta bidang sosial ekonomi. Tema judul PKM Umsida diantaranya tentang kepedulian terhadap masyarakat lapisan bawah, membangun kerjasama dengan usaha mikro, peningkatan kualitas mutu pendidikan dan lainnya. Antusiasme mahasiswa untuk mengikuti PKM juga ditegaskan oleh Syahrul Ardiansyah, selaku Kepala Kemahasiswaan Umsida. Beliau menuturkan, "Ketika mendengar ada pembukaan pendaftaran proposal PKM, mahasiswa terlihat sangat semangat. Para mahasiswa ingin bekerjasama dengan mitra yang hasilnya bisa bermanfaat untuk mereka."³⁴

Banyaknya proposal PKM yang diupload menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan bangsa melalui karya. Berikut ini data jumlah jenis PKM Umsida yang diupload pada tahun 2019:

Tabel 4.1³⁵
Jumlah Jenis PKM Yang Diupload Tahun 2019

JENIS PKM	JUMLAH
Kewirausahaan	194
Pengabdian Kepada Masyarakat	16
Karsa Cipta	104
Penelitian Eksakta	18
Penelitian Sosial Humaniora	24
Gagasan Tertulis	15
Gagasan Futuristik Konstruksif	7

³⁴ Alim Ahadin , *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Januari 2020.

³⁵ *Dokumentasi*, Data Jumlah Jenis Pkm Umsida 2019.

³⁶ *Dokumentasi*, Kemahasiswaan Umsida 2019.

Seiring dengan slogannya “membela untuk negeri; dengan semangat memberi dan berbagi, kita bisa menjadi faktor penting dalam setiap perubahan melalui kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun”, LAZIZMU Umsida selalu berkomitmen untuk ikut serta memajukan kehidupan bangsa. Berikut ini visi dan misi LAZIZMU Umsida :³⁸

Misi:

- Menyelenggarakan pengelolaan ZISKA yang amanah, profesional dan transparan.
- Meningkatkan pendayagunaan ZISKA yang kreatif, inovatif dan produktif.
- Meningkatkan tata kelola layanan ZISKA berbasis teknologi informasi.
- Mengembangkan kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam pengelolaan ZISKA.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Perlu diketahui bahwa program LAZIZMU Umsida meliputi: program beasiswa Sang Surya, save our school, dai muda, rebranding masjid, filantropis muda, goes to school, entrepreneur muda, dan program Indonesia siaga tanggap bencana. Diantara program-program yang diagendakan LAZIZMU, ada beberapa program sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai kebangsaan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, diantaranya adalah:

Gerakan penyelamatan sekolah pinggiran melalui Intergrated Development for Education (IDC) yang menggabungkan antara pembangunan sarana prasarana, pengembangan sistem pengajaran, pendampingan sekolah dan peningkatan kualitas SDM guru.

Kegiatan mahasiswa untuk membenahi masjid/mushola dilingkungannya dengan bentuk kegiatan penataan lingkungan masjid, selokan masjid tempat wudhu, tempat parkir, pengecatan, pemasangan neon box, papan nama dan perawatan sarana dan alat ibadah.

Program Filantropis ini bertujuan untuk mendidik dan menumbuhkan jiwa

³⁹Yekti Pitoyo, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Januari 2020.

Kumara Adji Kusuma, selaku manager LAZIZMU UMSIDA menjelaskan tentang konsistensi mahasiswa dalam kegiatan GIZMA. Menurutnya, “mahasiswa Umsida sangat konsisten dengan kegiatan GIZMA. Setiap seminggu sekali (hari Kamis) dilaksanakan GIZMA oleh para relawan Lazismu Umsida yang tergerak hatinya untuk menyempatkan waktu dan tenaganya atas nama kemanusiaan”.⁴⁰

Kegiatan mahasiswa untuk mengadakan safari ke sekolah SMA/SMP/SD dengan bentuk kegiatan pesantren kilat, kajian remaja, edukasi filantropi. Menurut Yekti, “bentuk kegiatan dari program goes to school sangat bermanfaat. Kepedulian mahasiswa dalam memajukan pendidikan Indonesia sangat terbukti melalui program ini.”⁴¹

Program penanganan bencana alam mulai dari tahap kesiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Program Indonesia meliputi tanggap darurat bencana, sekolah siaga, lumbung siaga dan relawan siaga. Program Indonesia

⁴¹Yekti Pitoyo, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Januari 2020.

Tabel 4.2⁴⁵
Daftar Peserta LATGAB MLHPB Jawa Timur
Kelas Psikososial

Data tentang kegiatan yang menjadi wadah aktualisasi mahasiswa diatas membuktikan bahwa selain mahasiswa mengaktualisasikan ke dalam program internal kampus, mahasiswa terus mengembangkan dedikasinya keluar kampus dengan mengaktualisasikan yang lebih luas lagi dalam program kemanusiaan

⁴⁵ *Dokumentasi*, Daftar Peserta LATGAB MLHPB Jawa Timur

Muhammadiyah. Proses internalisasi nilai yang optimal menjadikan aktualisasi nilai juga maksimal. Hal ini menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam berkomitmen untuk selalu mengembangkan nilai kebangsaan sebagai realisasi dari ‘*amar ma’rūf nahī munkar*’ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Uraian tentang aktualisasi materi wawasan kebangsaan diatas membuktikan bahwa mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dalam kegiatan sosial dan kesusilaan. Disinilah letak demokrasi pendidikan. Menurut Dewey, dalam lembaga pendidikan tidak diutamakan kecerdasan walaupun kecerdasan juga memiliki peran yang cukup vital. Meningkatnya nilai-nilai dalam diri yang diaktualisasikan dalam kegiatan praktis menunjukkan meningkat pula proses perbaikan diri. Disini fungsi pendidikan untuk perbaikan yang konstan bagi kelestarian hidup sesuai dengan konsep demokrasi pendidikan Dewey “*education as a necessity of life*” terlaksana.

Konsep demokrasi pendidikan “*education as a social function*” ditunjukkan dalam proses perkuliahan AIK III tidak hanya sebagai sebuah tempat dan perantara interaksi watak mahasiswa dengan dosen pengampu, melainkan keseluruhan aktifitas mahasiswa terutama dalam melakukan aktifitas fisik sebagai pengaruh dosen pengampu AIK dalam menerapkan nilai-nilai yang akan menjadikan perubahan pada mahasiswa secara gradual. Perubahan yang mengacu kepada perubahan yang gradual tersebut merupakan efek pendidikan yang masing-masing mahasiswa berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau mengaktualisasikannya dengan tujuan tertentu.

Dalam konsep demokrasi pendidikan John Dewey juga menyebutkan *“education as reconstruction”*. Pengalaman menggapai masa yang akan datang merupakan pembuka bentuk eksternal dan rekapitulasi masa lalu. Tujuan dari perkuliahan AIK III dalam materi wawasan kebangsaan diharapkan memiliki perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik untuk menjamin kualitas suatu pendidikan dan kuantitas nilai materi dalam pendidikan tersebut. Materi perkuliahan memiliki nilai yang secara kuantitas berisikan nilai-nilai kebangsaan yang terinternalisasi dalam materi wawasan kebangsaan.

[illegible]

Menurut Dewey suatu masyarakat harus mempunyai tipe pendidikan yang memberikan interest pribadi dalam diri individu sebagai bentuk keterikatan, relasi dan kontrol sosial, dan kebiasaan-kebiasaan sosial dan dirubah tanpa memperkenalkan kekacauan. “ *Education as nation and as social*” termasuk salah satu konsep dalam demokrasi pendidikan Dewey. Perhatian yang sistematis terhadap pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk pemulihan dan pemeliharaan integritas politik dan kekuasaan. Identifikasi dari konteks historis wawasan kebangsaan Muhammadiyah dapat menjadi dorongan untuk merekonstruksi kurikulum AIK III sebagai tatanan pendidikan yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal yang menjadi temuan selama melakukan penelitian. Dari data tentang dasar filosofis dan konteks historis wawasan kebangsaan dalam Muhammadiyah, proses perumusan materi wawasan kebangsaan Muhammadiyah dalam kurikulum Al Islam dan Kemuhammadiyah serta aktualisasi materi wawasan kebangsaan dalam menginternalisasikan nilai kebangsaan Muhammadiyah, Terdapat tiga hal yang menjadi temuan penulis sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Dasar filosofis wawasan kebangsaan dalam pendidikan Muhammadiyah terdapat pada tujuh falsafah ajaran yang merupakan landasan bagi para pewaris Muhammadiyah yang telah mematrikan jiwa/ruh Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Falsafah dan wejangan tersebut mengandung tiga etos yang menjadi dasar filosofi gerakan wawasan kebangsaan Muhammadiyah, yakni Etos Welas Asih, Etos Al Ma'un dan Etos Al 'Ashr. Dasar filosofis diatas menjadi spirit Muhammadiyah dalam gerakan amal usaha Muhammadiyah khususnya bidang pendidikan yang tidak hanya diperuntukkan bagi warga Muhammadiyah, namun kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh bangsa sebagai wujud komitmen wawasan kebangsaan Muhammadiyah di negara Indonesia. Sedangkan Kontribusi Muhammadiyah dalam wawasan kebangsaan demi keberlangsungan negara

- [illegible]

- [illegible]

internal kampus, yang meliputi: UKM Hizbul Wathan, Program KKN Muhammadiyah Untuk Negeri, dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Sedangkan aktualisasi materi Wawasan Kebangsaan Melalui Program Amal Usaha Muhammadiyah meliputi: Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZIZMU), dan program Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Aktualisasi materi wawasan kebangsaan membuktikan bahwa mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai dalam kegiatan sosial dan kesusilaan. Disini fungsi pendidikan untuk perbaikan yang konstan sesuai dengan konsep demokrasi pendidikan Dewey *“education as a necessity of life”* terlaksana. Konsep demokrasi pendidikan *“education as a social function”* ditunjukkan dalam proses perkuliahan AIK III yang menjadikan perubahan pada mahasiswa secara gradual dalam beberapa aktivitas atau mengaktualisasikannya dengan tujuan tertentu. Kegiatan yang mereka pilih sebagai wadah untuk mengaktualisasikan nilai beragam. Perasaan sosial berupa nilai-nilai kebangsaan merupakan capaian pembelajaran dalam perkuliahan AIK III dengan kekuatan dari penyampaian materi dan strategi masing-masing yang menggambarkan konsep Dewey *“education as direction”*. Dari kegiatan yang menjadi aktualisasi mahasiswa membuktikan telah terjadi perbaikan atas diri mahasiswa dan sebuah pembentukan diri. Hal ini seiring dengan pandangan Dewey dalam konsepnya *“education as growth”*. Pembiasaan-pembiasaan sikap dalam mengaktualisasikan nilai kebangsaan yang dilakukan sebagai tanggungjawab mahasiswa dimasa mendatang, sesuai dengan pernyataan John Dewey, bahwa

” *preparing or getting ready for some future duty or privilege*’. Identifikasi dari konteks historis wawasan kebangsaan Muhammadiyah dapat menjadi dorongan untuk merekonstruksi kurikulum AIK III sebagai tatanan pendidikan yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal ini sesuai dengan konsep Dewey “ *Education as nation and as social*” yang menyebutkan bahwa pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk pemulihan dan pemeliharaan integritas politik dan kekuasaan.

B. Implikasi Teoretik

Aktualisasi nilai kebangsaan merupakan tujuan akhir dari pemberian materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah.

III. Aktualisasi adalah bagian dari wujud internalisasi nilai dalam proses pembelajaran. Proses internalisasi dimulai dari perumusan kurikulum sampai dengan implementasi pembelajaran. Untuk menelaah hal ini, peneliti menggunakan tiga teori utama, yakni; 1) *the society oriented curriculum*, 2) teori internalisasi nilai (*value internalization theory*) dan 3) teori demokrasi dalam pendidikan (*democracy of education theory*).

Penelitian ini menegaskan dan memperkuat teori-teori tersebut. Dari uraian proses perumusan kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah III diatas dapat dianalisa bahwa dalam mengembangkan kurikulumnya, Tim pengembang kurikulum Al Islam dan kemuhammadiyah PP Muhammadiyah menggunakan desain kurikulum *the society oriented curriculum* atau desain kurikulum berorientasi pada masyarakat yang didasarkan pada asumsi bahwa tujuan dari

Teori kedua menyatakan bahwa internalisasi nilai merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai secara mendalam sehingga membentuk kepribadian yang

Teori Internalisasi digunakan untuk menganalisis internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam diri mahasiswa. Proses perkuliahan dalam perkuliahan Al Islam dan Kemuhammadiyah III khususnya materi wawasan kebangsaan, diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan secara optimal. Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupaya untuk meninjau materi kurikulum AIK III dengan memasukkan materi kebangsaan yang kemudian disusunlah silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk dijadikan rujukan dosen pengampu dalam menginternalisasikan nilai kebangsaan ke mahasiswa. Dari proses internalisasi nilai diharapkan adanya perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dengan mengaktualisasikannya ke dalam kegiatan- kegiatan secara praksis.

¹ Soedijarto, *Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan Dan Bermutu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 145-146.

² Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John Dewey*, 86.

² Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progressivisme John Dewey*, 86.

kuantitas nilai materi dalam pendidikan tersebut. materi perkuliahan haruslah memiliki nilai yang secara kuantitas berisikan nilai-nilai kebangsaan yang terinternalisasi dalam materi wawasan kebangsaan. Ketika nilai-nilai kebangsaan sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, maka sikap kebangsaannya semakin tinggi. Hal ini akan menjadi perbaikan atas diri mahasiswa dan sebuah pembentukan diri, seiring dengan pandangan John Dewey tentang konsepnya, *education is formation and education as a necessity of life*.³ Pembiasaan-pembiasaan sikap dalam mengaktualisasikan nilai kebangsaan menunjukkan bahwa *education as growth*.⁴ Pembiasaan yang telah dilakukan akan terbawa sampai dimasa yang akan datang. Persiapan untuk menjadi generasi penerus bangsa sebagai tanggungjawab mahasiswa dimasa mendatang, sesuai dengan pernyataan John Dewey, bahwa ” *preparing or getting ready for some future duty or privilege*’.⁵

Temuan baru dalam penelitian ini adalah konten materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum matakuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah III belum memuat pernyataan monumental tentang komitmen kebangsaan Muhammadiyah, yaitu rumusan tentang Negara Pancasila sebagai *Dārul ‘Ahdī Wa Shahādah* yang merupakan hasil rumusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015. Hal ini menuntut Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melakukan peninjauan ulang kurikulum AIK III,

³ John Dewey, *Democracy and Education* (New York : Macmillan, Originally Published, 1916), 62-63.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 80.

C.Keterbatasan Penelitian

Pertama, lingkup penelitian. Lingkup untuk meneliti perumusan materi AI Islam dan Kemuhammadiyah, hanya terfokus pada kurikulum AIK III, dikarenakan dalam silabus AIK III terdapat materi wawasan kebangsaan sebagai peneguhan komitmen Muhammadiyah tentang hubungannya dengan negara.

D. Rekomendasi

[illegible]

Abdullah, Amin. *Pendekatan Teologis Dalam Memahami Muhammadiyah. Dalam: Kelompok Studi Lingkaran (ed.). Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*. Bandung: Mizan & KSL, 1995.

Abdurrahman, Asymuni dkk. *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015

Abror, Robby H. “Rethinking Muhammadiyah: Masjid, Teologi Dakwah Dan Tauhid Sosial”, *Ilmu Dakwah*, Vol. 6, No. 19, Januari, 2012.

Achmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah: Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2010.

Allan, Ornstein C, dkk. *Curriculum, Foundation, Principles, and Issues*. Boston: Allyn and Bacon, 1988.

Al-Faruqi, Isma’il Raji. *Tauhid*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1982.

Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Ali, As’ad Said. *Negara Pancasila: Jalan kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2012.

Ali, Mukti. ”Amalan Kyai Haji KH Ahmad Dahlan”, dalam Sujarwanto & Haedar Nashir, *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan* . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka, 1981.

Arifin, Syamsul. “Rekonstruksi Al Islam Kemuhammadiyah (AIK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sebagai Praksis Pendidikan Nilai”, *Edukasi*, Vol. 13, No. 2, Agustus, 2015.

Asy’ari, Hasyim. *Relasi Negara dan Agama di Indonesia, Rechtsvinding*, 2015.

Asyari, Suaidi. *Nalar Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta : LKIS, 2009.

Aziz, Abdul. *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011.

- Azra, Azyumardi “Nasionalisme, Etnisitas dan Islam dalam politik Kontemporer”, *Seminar Nasional, Negara dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta, 31 Agustus 1999.
- _____. *Pendidikan Kewarga[negara]an Civic Education: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2016.
- _____. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Badudu & Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Bahtiar, Asep Purnama. “Komitmen Muhammadiyah Dalam Konteks Kebangsaan Dan Good Governance”, *Tajdida*, Vol. 15, No.2, Desember, 2017.
- Baidarus, “Muhammadiyah Dan Pendidikan Karakter Di Indonesia”, *Islamika*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Baidhaw, Zakiyuddin. “Muhammadiyah dan Spirit Islam Berkemajuan dalam Sinaran Etos Al Qur’an”, *AFKARUNA*, Vol.13, No. 1, Juni, 2017.
- Bandarsyah, Desvian. “Dinamika Tajdid Dalam Dakwah Muhammadiyah”, *Historia*, Vol.4, No.2 2016.
- Beck, Ulrich. *Risk Society: Toward a New Modernity*. London: Sage Publication, 1992.
- Budiman, “Tantangan Pendidikan Muhammadiyah”, http://worldonstory.blogspot.com/2014/06/tantangan-muhammadiyah-dalam-bidang_9909.html
- Chapra, M. Umer. *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan & Perlunya Reformasi, Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media, 2000.
- Damami, Muhammad. *Akar Gerakan Muhammadiyah* .Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York : Macmillan, Originally Published, 1916.
- Eddy, I Wayan Tagel. “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”, *Dharmasmrty*, Vol. 1, No. 18, Mei, 2018.

- Jinan, Mutohharun. "Muhammadiyah Studies: The Transformation of Research on Islamic Movement in Indonesia", *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol.22, NO. 2, Desember 2015.
- Junaidi, Muhammad, dkk. "Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah Dalam Penguatan Kader Persyarikatan", *Tajdida*, Vol. 16, No. 2, Desember, 2018.
- K.R.H. Hadjid. *Pelajaran KHA Dahlan: 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Alquran*. Yogyakarta: LPI PPM, 2006.
- Kahin, George Mact. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press, 1970.
- Kemal, Mustafa, & Darban, Ahmad Adaby. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam: Perspektif Historis dan Ideologis*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000
- Khoirudin, Azaki. *Teologi Al-'Ashr: Etos dan Ajaran KHA Dahlan yang Terlupakan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Lazuardi, Adi Sage. *Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam*. Jakarta: Citra Media, 1996.
- Lindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Maarif, Ahmad Syafii. *al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*. Yogyakarta: Sipress, 1990.
- _____. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mahsun. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajrid Dan Tajdid* . Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2017.
- Majelis Dikdasmen PP. Muhammadiyah, *Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Al Islam dan Kemuhammadiyahan*. Jakarta: Majelis Dikdasmen, 2007.
- Majelis DIKDASMEN PWM DIY, "Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah", <https://www.smkmuhberbah.sch.id/2012/02/revitalisasi-pendidikan-muhammadiyah.html> , 2 April 2020.

- MC. Ricklefs. "Muhammadiyah dan Pemerintah". *Kompas*, 21 November 2012.
- McCloud, Donald G. *System and Process in Southeast Asia. The Evolution of Region*. Boulder, CO: Westview, 1986.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: 2010.
- Muhadjir, Noeng. "Tajdid Muhammadiyah di Bidang Pendidikan pada era Globalisasi untuk Pemberdayaan Umat", dalam *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*, Safar Nashir. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah dan UAD Press, 2005.
- Mukhan, Abdul Munir. *Boeah Fikiran Kijahi H.A. Dachlan*. Jakarta: Global Base Review & STIEAD Press, 2015.
- _____. *Etika Welas Asih dan Reformasi Sosial Budaya Kyai KH Ahmad Dahlan*. Jakarta: Bentara, Kompas, 2005.
- _____. *Kiai KH Ahmad Dahlan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- _____. *Menggugat Muhammadiyah*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- _____. *Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- _____. *Warisan Intelektual K.H. KH Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT. Percetakan Persatuan, 1990.
- Mythen, Gabe Mythen. *A Critical Introduction to the Risk Society*. London: Pluto
- Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- _____. *Bulan Sabit Muncul Dari Balik Pohon Beringin*, terj.M. Yusron Asrofie. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- _____. *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: a Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Institute of Southeast Asian Studies, 1983.
- Nashir, Haedar. "Muhammadiyah Majukan Indonesia", *Republika*, 23 Oktober 2018.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo: Umsida Press, 2018.
- Suhady & Sinaga, *Wawasan kebangsaan Dalam Kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2006.
- Sunarso, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press, 2006.
- Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan, Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Kota Kembang, 2008.
- Suyatno, dkk, *Revitalisasi Pendidikan Muhammadiyah Di Tengah Persaingan Nasional Dan Global*. Jakarta: Uhamka Press, 2010.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logo, 2000.
- _____. “Negara Pancasila, Darul Ahdi Wa Syahadah, Sebuah Epilog: Relevansi dan Implementasi”, *Seminar Pra Mukhtamar Muhammadiyah ke 48*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 3 Maret 2020.
- _____. “Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Persaksian (Darul Ahdi Was Syahadah”, *Taushiyah Kebangsaan*, Jakarta: Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, 18 Agustus 2011.
- _____. *Muhammadiyah Kini dan Esok*, ed. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- _____. *Muhammadiyah Untuk Semua*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Tim AIK, *Pedoman Pendidikan AIK*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah, 2013.
- Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000.
- Yusuf, M. Yunan, *Teologi Muhammadiyah; Cita Tajdid dan Realitas Sosial*. Jakarta: Uhamka Press, 2005.